EDISI III / 2011

ISSN: 1979-6293

REALITA HAJI

MEDIA KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

PERENCANAAN HAJI: MEWUJUDKAN KINERJA HAJI YANG LEBIH BAIK



DAFTAR ISI



Perencanaan Haji yang Komprehensif

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, sehingga perencanaannya harus melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya.

hl. 6

REALITA **HAJI**

MEDIA KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



MA Ghafur selaku anggota Delegasi RI untuk pembicaraan WNI overstayer dengan pemerintah Arab Saudi, menjenguk Sumiati, TKW yang dianiaya majikannya.

Purna Tugas 'Kamus Haji Berjalan'

Terhitung sejak 1 April 2011, Drs.H. Abdul Ghafur Djawahir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah purna tugas di Kementerian Agama RI.

hl. 13



Menyoroti RUU Tata Kelola Dana Haji

Usaha pengelolaan dana haji kini memasuki tahap legalisasi untuk melindungi dana yang merupakan milik para jemaah calon haji.

hl. 20

Persiapan Haji 1432H/2011M

Saat ini seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) mulai melangkah melakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011M sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional Evaluasi Haji 1431H/2010M yang berlangsung akhir Januari 2011.

Tentu saja sebelum melangkah lebih jauh, perencanaan perlu disusun untuk selanjutnya segera direalisasikan. Dalam kaitan ini, Realita Haji (RH) sebagai majalah internal Ditjen PHU perlu menyampaikan bagaimana menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk itu, dalam Edisi III tahun 2011 ini, kami telah mewawancarai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, Drs. H. Syamsudin untuk mengetahui lebih dalam, bagaimana perencanaan penyelenggaraan ibadah haji itu disusun. Ternyata, menurut mantan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama itu, idealnya penyusunan rencana penyelenggaraan ibadah haji itu harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, maka perencanaannya tidak cukup hanya dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen PHU.

Selain itu, juga kami turunkan profil Sekretsris Ditjen PHU, MA. Ghofur Djawahir yang dikenal sebagai "Kamus Haji Berjalan" karena penguasaannya atas semua persoalan yang terkait dengan perhajian. Maklum, lebih 30 tahun beliau mengabdi di lingkungan Ditjen PHU dan dalam waktu dekat, beliau memasuki purna tugas.

Informasi lainnya yang kami turunkan tekait dengan usaha pengelolaan dana haji. Saat ini pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelola Dana Haji. Materi RUU tersebut masih dalam pembahasan di tingkat internal Kementerian Agama, sedangkan rubrik lainnya akan hadir seperti biasanya, seperti *Manasik Haji*, *Kronika Dalam Negeri* dan *Kronika Luar Negeri*, *Hajisiana*, *Info Kebijakan* dan sebagainya.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca kepada para pemerhati haji yang budiman. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah wawasan perhajian serta memahami dengan baik penyelenggaraan ibadah Haji. Kami tidak bosan-bosannya berharap adanya masukan dari para pembaca tercinta. Sehingga akan menjadikan *RH* lebih berbobot dan berkualitas. Demikian gambaran mengenai materi majalah untuk edisi III tahun 2011.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pemimpin Redaksi

Diterbitkan oleh:
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
Alamat Redaksi:
Gedung Kementerian Agama, Lt. VI/C. 603
Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telp.: (021) 3846446. Fax.: (021) 3800174
Email: realitahaji@gmail.com

Majalah ini terbit setiap bulan. Redaksi menerima kritik, saran dan naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan menghubungi redaksi dan melalui email kami.





REALITA
HAJI
MEDIA KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Tim Penerbitan dan Pengelolaan Majalah *Realita Haji*

Penanggung jawab:
Slamet Riyanto,
M.A. Ghafur Djawahir
Pemimpin Redaksi:
Ali Rokhmad
Wakil Pemimpin Redaksi:
M.Amin Akkas
Sekretaris Redaksi:
Suviyanto
Redaktur Senior:
Hadi Mustofa, Syaiful Anam,
Redaktur:
A. Kartono, Zainal Abidin Suphi,
Ahmad Djunaidi, Bahar Maksum,
Musthafa Helmy
Editor:
Arif Nurrawi, Ahmad Baedowi,
Toto Sugiarto, Nashir Maqsudi,
M. Affan Rangkuti
Desain Visual & Fotografer:
Asmawi , Suprayudi, Ahmad Rizal,
Reza Muhammad, Ambari Julianto
Sekretariat:
Tamriyanto, Mulyo Widodo,
Inngam Anwari, Shoim Munawar,
Siti Nurbaiti, Fajris Saidah,
Deni Hidayat, Endang Sugandi,
Sutiar Utomo

PERLU RUBRIK KONSULTASI HAJI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya sudah membaca majalah *Realita Haji* sejak Januari 2011 lalu. Sebagai pembaca yang pernah melaksanakan umrah, namun belum haji, membaca *Realitas Haji* sepetri menghibur batin saya.

Tulisan-tulisan dalam majalah ini cukup memberi informasi saya tentang perhajian. Haji tidak sesederhana yang dipahami orang. Jumlah jemaah haji yang lebih 200.000 orang membutuhkan kepiawaian, pengalaman, serta tangan dingin seorang manajer. Karena itu saya acungkan jempol untuk majalah *Realita Haji*.

Realita Haji saya akui memang corong Kementerian Agama, tapi, pada satu sisi yang perlu diketahui masyarakat. Misalnya, biaya haji yang perlu diketahui masyarakat luas yang tidak akan dijumpai di majalah lain.

Namun, setelah saya buka-buka, ada hal yang tampil yang justri sangat saya butuhkan. Yaitu, konsultasi haji. Banyak hak yang perlu saya ketahui yang sulit saya temukan jawabannya melalui buku, yang saya harapkan bisa saya temukan melalui majalah *Realita Haji*.

Karena itu, mohon kiranya majalah *Realita Haji* memuat Konsultasi haji yang bisa menjawab beberapa persoalan perhajian yang tidak bisa dibaca di media lainnya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ahmad Muzammil Alhaddad
Purwokerto, Jawa Tengah.

** Permintaan Anda akan kami perhatikan dan kami bawa dalam rapat perencanaan majalah. Memang pernah terpikirkan untuk membuat rubrik Konsultasi Haji.*

Terima kasih – **Red.**

REALITA HAJI HARUS LEBIH TEBAL

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Majalah *Realita Haji* (RH) sudah kami baca sejak musim haji tahun 2010 lalu di Embarkasi Surabaya. Tapi, karena bukan karyawan Kementerian Agama, kami kesulitan mendapatkan majalah ini.

Setelah kami coba melalui email, mudah-mudahan redaksi *Realita Haji* bisa memberi tahu kami bagaimana kami bisa mendapatkan majalah ini.

Terima kasih atas perhatiannya dan bisa mengirim alamat agen *Realita Haji* yang bisa kami peroleh di daerah Surabaya dan sekitarnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hj. Muthmainnah
Jagir, Surabaya, Jawa Timur.

** Majalah* Realita Haji *belum dicetak untuk umum dan baru didistribusikan di Kantor Kementerian Agama seluruh Indoenesia. Untuk mendapatkannya, tentu Anda bisa menghubungi kantor Kementerian Agama setempat yang tentu saja hanya bisa meminjamkannya. Terima kasih atas perhatian Anda.*

Terima kasih – **Red.**

MANA REALITA HAJI VERSI ONLINE

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kadang-kadang timbul keinginan saya untuk membaca beberapa tulisan tentang haji. Di internet tak bisa menutup keinginan saya untuk mengetahui lebih banyak soal haji. Menurut saya, majalah *Realita Haji* cukup bagus mengungkap persoalan haji.

Hanya, masalahnya, edisi cetak tak bisa dibaca dan diakses dari jauh. Kebetulan anak kami tengah kuliah di Australia tak bisa lagi membacanya.

Karena itu, saya usul agar majalah *Rrealita Haji* dibuat edisi *online* yang bisa dibaca siapa pun dan kapan pun tanpa terikat tempat dan waktu. Pembaca di Amerika Serikat pun bisa membacanya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

H. Abdul Ghani Saragih, SH
Bogor. Jawa Barat.

** Terima kasih atas saran Anda dan akan menjadi pertimbangan kami.*

Terima kasih – **Red.**

REALITA HAJIUNTUK JEMAAH HAJI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca majalah *Realita Haji* beberapa nomor yang lalu, muncul keinginan dan usul saya agar majalah ini bisa dibagikan utnuk semua calon jemaah haji.

Sebab, majalah ini sangat bermanfaat untuk jemaah haji. Informasinya sangat mendidik, sehingga jemaah haji tahu persis seperti apa pelaksanaan perhajian yang rumit itu.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Siti Muyassarah, S.Ip
Depok, Bogor, Jawa barat.

** Usulan Anda akan kami perhatikan dan tentu akan kami sesuaikan dengan mata anggaran yang ada.*

Terima kasih – **Red.**

RALAT

Telah terjadi kesalahan pada rubrik* Surat Pembaca Realita Haji *Edisi II 2011 tertulis:* majalah yang kita cintai ini tidak bisa diperjual-belikan, karena menggunakan anggaran optimalisasi setoran awal pendaftaran jemaah calon haji. *Seharusnya:* **majalah yang kita cintai ini tidak bisa diperjual-belikan, karena menggunakan anggaran DIPA/APBN – Red.

** Pada Daftar Isi tertulis:* Apa kebijakan lanjut setelah umat Islam membanggakan jam Makkah. Sejauh mana pengaruhnya pada penghitungan waktu? **hl. 6**

Seharusnya: Pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Menteri Agama sekaligus peluncuran seragam batik bagi jemaah haji. **hl. 6**

Terima kasih – **Red.**

Redaksi menerima surat dan saran pembaca melalui email: *realitahaji@gmail.com*. Bagi surat pembaca yangberhasil dimuat akan kami kirimkan sebuah majalah. Cantumkan alamat lengkap dan pas foto (jika ada) - **Red.**

Penyelenggaraan Ibadah Haji Sebagai Tugas Nasional

Siklus penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun sebenarnya tidak jauh berbeda. Usai pelaksanaan ibadah haji akan dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh, termasuk di dalamnya evaluasi atas para petugas haji yang baru pertengahan April 2011 yang lalu dilaksanakan. Lantas dilanjutkan dengan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya atau musim haji 1432H/2011M.

Begitu seterusnya. Dan, itu di internal pihak eksekutif, termasuk di dalamnya dari Kementerian Kesehatan yang juga punya peran tidak kalah pentingnya yang harus direncanakan dengan Kementerian Agama. Karena masalah kesehatan bagi para jemaah haji, memiliki arti penting untuk keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

Itu bukan berarti institusi lainnya, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM tidak penting perannya dalam penyediaan dokumen perjalanan haji berupa paspor. Atau Kementerian Perhubungan yang berperan dalam penyediaan transportasi udara. Atau Kementerian Dalam Negeri dengan para Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten dan Kota yang harus melayani kepentingan warganya yang akan menunaikan ibadah haji, serta Kementerian Luar Negeri yang harus melayani warga negara Indonesia saat berada di luar negeri.

Semua itu merupakan satu-kesatuan dalam entitas penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Masing-masing institusi saat ini melakukan persiapan-persiapan dan perencanaan untuk mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang insya Allah pemberangkatan kelompok terbang (Kloter) pertama jemaah calon haji dimulai pada awal Oktober atau akhir September 2011.


Ali Rokhmad

Demikianlah siklus persiapan dan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji secara internal di kalangan pelaksana atau penyelenggara. Pada sisi lain ada Komisi VIII DPR RI serta Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai partner kerja dari Kementerian Agama, Komisi V DPR RI sebagai partner Kementerian Perhubungan, Komisi X sebagai partner Kementerian Kesehatan, Komisi III sebagai partner Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi II sebagai partner Kementerian Dalam Negeri.

DPR RI dan DPD RI merupakan partner yang selalu terlibat dalam pembahasan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji. Semuanya harus dibahas bersama serta disepakati bersama untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pihak eksektif dan diawasi pelaksanaannya oleh kedua lembaga legislatif tersebut.

Pada sisi yang lain lagi, ada pengawas eksternal dan internal dari masing-masing kementerian yang mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, yakni Inspektorat Jenderal. Ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengawasinya dari aspek penggunaan keuangan. Ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), serta pengawasan masyarakat.

Kembali kepada siklus persiapan dan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji. Ketika masalah itu berlangsung di internal institusi masing-masing atau bahkan pembahasan bersama seluruh institusi penyelenggara ibadah haji, yang biasanya dipimpin oleh Kementerian Kordinator Bidang Kesra, semua pembahasan biasanya berlangsung lancar, meski sering ada masukan-masukan dari pejabat instansi tertentu kepada instansi lainnya.

Tetapi ketika pembahasan demi pembahasan dengan pihak lain, terutama dengan legislatif, di sinilah pembahasan itu sering harus melalui perjalanan yang sangat alot dan berbelit-belit, semua itu karena sikap kritis dari para anggota Dewan sebagai wakil rakyat. Dan, sikap kritis itu memang penting sehingga perencanaan penyelenggaraan ibadah haji oleh pihak eksekutif, benar-benar dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Artinya, pihak legislatif yang terlibat dalam pembahasan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji serta menyetujuinya perlu komitmen bersama dan konsekuen menjaga hasil kesepakatan tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang disepakati.

Ini penting untuk ditegaskan, sehingga mayarakat luas bisa memahaminya bahwa meski persiapan dan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai penanggungjawab nasional, tetapi semua itu dibahas bersama dengan melibatkan pihak legislatif dan kementerian/lembaga terkait. Semoga perencanaan haji tahun ini dapat mewujudkan kinerja pelayanan haji yang lebih baik.■



Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, H. Syamsuddin saat diwawancara Suviyanto.

Perencanaan Haji yang Komprehensif

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, sehingga perencanaannya perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait secara komprehensif.

Sebenarnya semua pihak di Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya harus terpanggil untuk bersama-sama meningkatkan kualitas perencanaan penyelenggaraan ibadah haji yang terarah dan terprogram serta terukur, sehingga penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih sempurna dan lebih akuntabel untuk masa mendatang.

Itu semua, karena penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional, sehingga, tidak cukup perencanaan haji hanya ditangani Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), apalagi hanya diserahkan kepada Bagian Perencanaan Haji.

''Penyelenggaraan ibadah haji itu tugas nasional sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2008, karena itu berbagai pihak terkait harus bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik dan lebih sempurna," tegas Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, H. Syamsuddin dalam wawancara khusus dengan **Suviyanto** dan **Bahar Maksum** dari *Realita Haji* beberapa waktu lalu di ruang kerjanya, Jakarta.

Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Agama sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hanya saja, sejumlah instansi terkait punya tanggungjawab sesuai dengan bidang masing-masing, seperti Kementerian

Kesehatan bertanggungjawab secara keseluruhan atas persoalan kesehatan jemaah haji Indonesia.

Demikian juga dengan persoalan transportasi, tanggungjawabnya berada pada Kementerian Perhubungan. Soal dokumen perjalanan, seperti paspor, menjadi tanggungjawab Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota juga punya tanggungjawab sendiri-sendiri sesuai kapasitas yang menjadi kewenangannya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Semua itu diatur dalam UU No 13 tahun 2008 itu, sehingga, jika ada persoalan dengan penyelenggaraan ibadah haji, tidak bisa hanya Ditjen PHU yang harus bertanggungjawab, mereka semua juga ikut bertanggungjawab," tegas pejabat karir yang sejak menjadi Pegawai Kementerian Agama berkarir di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di kementerian tersebut.

Dengan demikian, katanya lebih lanjut, sekiranya ada pihak yang menyoroti adanya persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji, instansi-instansi itu juga harus ikut bertanggungjawab. Seperti Balitbang dan Diklat Kementerian Agama atau instansi lainnya, harus ikut mencari solusi sesuai kewenangannya, bagaimana mengatasi persoalan itu.

"Balitbang harus melakukan penelitian dan pengkajian, bagaimana mengatasi persoalan itu. Untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, mereka bisa melakukan pengkajian dan penelitiannya. Mereka tidak boleh tinggal diam melihat adanya persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji," tegasnya.

Bahkan, menurut sarjana pendidikan IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat ini, instansi-instansi pengawasan, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan lainnya, juga harus ikut memberikan masukan melalui temuan-temuannya di lapangan semasa penyelenggaraan ibadah haji, agar ke depan penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih baik, lebih berkualitas dan lebih sempurna. "Itu maksud dari penegasan undang-undang, bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional," tegasnya lebih lanjut.

Jadi, menurut Syamsuddin, jangan hanya mencari-cari kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, tetapi bagaimana menawarkan alternatif solusi, memberikan sumbangan pemikiran, bukan hanya untuk mengatasinya, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Apakah pemikiran seperti itu pernah disampaikan dalam forum-forum pertemuan yang melibatkan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji? Syamsuddin mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan masalah itu dalam berbagai forum koordinasi dan konsultasi.

Bagaimana respon mereka? Syamsuddin mengatakan, mereka menyadari adanya tanggungjawab itu. Tetapi untuk melaksanakannya secara nyata dalam bentuk operasional, diakuinya masih belum optimal. "Kita perlu terus menerus menyampaikan hal itu, sehingga koordinasi antar semua instansi bisa lebih baik," tegasnya lagi.

Syamsuddin mengakui, kordinasi itu sangat penting dalam perencanaan penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi dengan peran Badan Litbang, mereka bisa melakukan perencanaan yang didasarkan pada data, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik atau pun secara tehnis. Karena kita yakin, suatu program yang direncanakan dengan baik dan didukung dengan data yang cukup, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. "Dalam hal ini peran Badan Litbang luar biasa," tegas mantan Sekretaris Balitbang Kementerian Agama itu.

Jadi, dalam hal ini perencanaan penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan lebih ideal, tidak hanya berdasarkan kompetensi atau teknis semata. Badan Litbang bisa melakukan penelitian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang akurat tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga akan ditemukan langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Demikian juga Sekretariat Jenderal (Setjen) dapat mendukung aspek manajemen dan pelaksanaan tugas teknis perhajian. Masukan dari lembaga-lembaga pengawasan, baik dari internal



Jemaah haji saat mendapat pengarahan di Asrama Haji Solo.

atau pun eksternal Kementerian Agama, sangat penting. Masukan lainnya dari para pengguna atau para jemaah haji, apakah mereka sudah terpuaskan dengan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Semua itu, menurut Syamsuddin akan menjadikan perencanaan dan pelaksanaan ibdah haji bisa lebih baik dan ideal, yang pada akhirnya akan mendongkrak akuntabilitas kinerja Kementerian Agama dan instansi terkait pada umumnya, dan khususnya bagi Ditjen PHU.

"Jadi, perencanaan itu, sumbernya bukan hanya dari pelaksana, tetapi juga dari wasit, penonton serta pemain sendiri, dalam hal ini para jemaah haji, apakah mereka terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh para petugas," tegas Syamsuddin mengumpamakan perencanaan penyelenggaraan haji yang harus dilakukan secara komprehensif dengan kekompakan tim sepakbola yang melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya.

Syamsuddin mengakui, dari instansi-instansi di lingkungan Kementerian Agama sendiri, hampir semuanya ada yang membidangi masalah haji, seperti di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Litbang, Pusat Pendidikan dan Latihan dan sebagainya perlu terus menerus melakukan koordinasi untuk peningkatan penyelenggaraan ibadah haji.

Mestinya mereka semua, menurut Syamsuddin memberikan sumbangan pada perencanaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kompetensi atau tanggungjawab di bidangnya masing-masing. Seperti Badan Litbang, bagaimana mereka melakukan penelitian soal penyelenggaraan ibadah haji. Kesimpulan serta rekomendasinya untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji sangat penting, karena hasil penelitian mereka bisa dipertanggungjawabkan secara akademik serta bisa dilaksanakan secara teknis.



Salah satu cara menangani jemaah haji usia lanjut dan risti.

Demikian juga peran dan kompetensi Pusdiklat. Menurut Syamsuddin, lembaga ini bisa berperan dalam memberikan pendidikan dan latihan bagi para petugas haji. Sehingga, mereka benar-benar memahami, apa yang harus mereka lakukan sebagai petugas haji yang pada intinya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para jemaah calon haji.

"Pendidikan dan pelatihan itu bisa masuk dalam perencanaan penyelenggaraan ibadah haji. Karena, peran petugas haji itu sangat penting dalam usaha memberikan pelayanan kepada para jemaah calon haji, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan nyaman demi meraih haji mabrur," tegas aktifis mahasiswa tahun 1970-an itu.

Bahkan, menurut Syamsuddin, perguruan tinggi Islam di lingkungan Kementerian Agama, seperti UIN, IAIN, atau STAIN, jangan tinggal diam ketika penyelenggaraan ibadah haji digugat oleh masyarakat karena pelayanannya tidak maksimal. Mereka harus menghadirkan tenaga profesional dari alumninya yang bisa menjadi petugas haji yang mampu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi para jemaah calon haji.

Dalam program nasional 2010-2014, penyelenggaraan haji menjadi program utama dan nomor I dalam bidang kesra. Bahwa pelaksanaan haji yang tertib dan lancar harus sudah tercapai pada musim haji 2010. "Alhamdulillah, dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010 yang lalu, bisa berlangsung dengan tertib dan lancar. Berarti target itu sudah tercapai," ujarnya lagi.

Syamsuddin sangat menyayangkan adanya sikap pegawai di lingkungan Kementerian Agama, dimana kalau ada sesuatu dengan penyelenggaraan ibadah haji, persoalan itu dianggap hanya Ditjen PHU yang harus bertanggungjawab.

"Sikap itu tidak benar. Haji bukan hanya persoalan Ditjen PHU, bahkan juga bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama. Itu tanggungjawab nasional. Sehingga, semua pihak yang terlibat dengan persoalan haji, harus ikut bertanggungjawab," tegas lelaki kelahiran Palembang tetapi besar di Kuningan, Jabar dan mengenyam pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta.

Oleh karena itu, menurut Syamsuddin, sukses pelaksanaan ibadah haji menjadi sukses nasional, dan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan, bahwa sukses pelaksanaan ibadah haji menjadi kebanggaan nasional, karena ini merupakan tugas nasional. ■

Bahar Maksum dan Suviyanto

100% Pemondokan Jemaah Haji 1432H di Ring I

Pelayanan jemaah haji Indonesia semakin baik dengan ditentukannya pemondokan mayoritas jemaah di Ring Satu.

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan tekadnya untuk menyediakan pemondokan bagi jemaah calon haji Indonesia 1432H/2011M semuanya di ring I yang berjarak terjauh dari Masjidil Haram 2000 meter. Komisi VIII DPR RI sangat mendukung tekad tersebut.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Menag dengan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, Abdul Kadir Karding beberapa waktu lalu. Hanya saja, Menag menyatakan, untuk sementara pihaknya mentargetkan, minimal 80% di ring I.

"Kami memang mentargetkan 100% jemaah calon haji kita pemondokannya di ring I yang berjarak paling jauh 2000 meter. Tetapi, kalau pun target itu tidak tercapai, minimal 80% mereka di ring I," tegas Menag ketika membahas kesimpulan hasil Raker tersebut yang berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga 01.15 WIB di Gedung DPR RI Senayan Jakarta awal Maret lalu.

Suasana dalam Raker nampak berjalan dengan baik, tidak nampak adanya sikap yang sangat kritis hingga mengarah kepada "permusuhan" seperti beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan penjelasan pimpinan Raker, ada sekitar 25 orang anggota Dewan yang hadir. Sementara Menag didampingi oleh Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto, Dirjen Bimas Islam Nasarudin Umar dan Irjen Kemenag, M. Suparta serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Kemenag.

Menag mengatakan, sebenarnya pihaknya secara berkelakar menyatakan, pemondokan di Ring I itu seharusnya lebih 100%. Karena, kalau hanya 100% persen, berarti semuanya hanya untuk para jemaah calon haji. Sementara di luar mereka, lantas mau tinggal di mana.

"Seperti para anggota Dewan, kami para petugas dan lainnya, lantas mau tinggal di mana? Sehingga, secara berkelakar ketika membahas pemondokan itu, saya bilang, kita harus mencari pemondokan di Ring I lebih dari 100%," tegas Amirul Hajj pada musim haji 1431H/2010M itu.

Soal rumusan ini sempat menjadi perdebatan hangat, karena anggota Dewan minta ketegasan agar 100% jemaah calon haji Indonesia di ring I. Sementara Menag



Menteri Agama dan pejabat Eselon I Kementerian Agama menjelaskan kebijakan perhajian pada Komisi VII DPRRI.


Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding.

Suryadharma Ali menyatakan, minimal 80% di ring I. "Artinya, kami juga ingin seluruh jemaah haji kita di ring I. Tetapi, kalau itu tidak tercapai, minimal 80% dulu," tegas Menag.

Dengan adanya terget tersebut, sebenarnya pihak Kemenag sudah menaikkan rencana pemondokan para jemaah calon haji Indonesia (JCHI) di ring I dari 63% musim haji 1431H/2010M naik 17% untuk musim haji 1432H/2011M.

Atas target yang demikian itu, justru Ketua Fraksi PPP Hazrur Azwar yang juga anggota Komisi VII DPR RI, justru mengusulkan, kenaikannya jangan terlalu tinggi. "Cukup 75% saja jemaah calon haji kita di Ring I. 25% di ring II yang jarak terjauhnya 4000 meter," usul Ketua Komisi VIII periode 2004-2009 itu. Tetapi usulan itu tidak mendapat tanggapan serius dari peserta Raker, karena dianggap mementahkan keinginan anggota Dewan yang ingin 100% di ring I dan Menag yang ingin minimal 80% di ring I.

Kesimpulan terakhir sebagai jalan tengah, disepakati bahwa target pemondokan haji 100% di ring I, tetapi kalau tidak tercapai, minimal 80% di ring I dan 20% di ring II. Hanya saja, tim Misi Haji Indonesia yang kini sedang mencari pemondokan di Makkah yang dipimpin oleh Direktur Pelayanan Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Zainal Abidin Supi (sampai berita ini ditulis) sudah berhasil mendapatkan pemondokan di Ring I sekitar 85%. Dan, mereka masih terus mencari pemondokan di ring I hingga bisa tercapai 100%.

"Itu target kita sebenarnya. Sehingga tim Misi Haji Indonesia yang sedang mencari pemondokan di Makkah belum kembali ke Tanah Air," ujar Direktur Pengelolaan Dana Haji, Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA yang secara terus menerus memantau perkembangan perolehan pemondokan yang sedang diusahakannya di Makkah.

Sebagai direktur yang bertugas dalam bidang pengelolaan dana haji, Djunaidi harus terus menerus memantau perkembangan hasil pencarian pemondokan yang kini diusahakan oleh Tim Akomodasi dan Kaatering untuk para jemaah calon haji Indonesia pada musim haji 1432H/2011M. Dalam kenyataannya, setiap saat tim yang ada di lapangan secara terus menerus melaporkan perkembangan hasil usahanya.

Saat ini tim di lapangan dalam usaha mencari pemondokan untuk jemaah calon haji Indonesia dipimpin oleh Kasubdit Akomodasi dan Katering, Drs. H. Ahda Barori dengan sekretarisnya, Moh. Hanif serta beranggotakan Mohammad Arsyad dari Subdit Pelayanan Haji, Kasubdit Transportasi, Drs. H. Subakin Abdul Mutholib, Itjen Kemenag serta dari Teknis Urusan Haji (TUH) Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Apresiasi DPR RI

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Kementerian Agama atas upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan haji. Termasuk komitmennya yang memprioritaskan jemaah haji lanjut usia masuk dalam kuota.

Dengan demikian, jemaah haji yang usianya sudah lanjut tidak menunggu lama.Apalagi, masih ada sisa kuota yang tidak terserap."Kami dukung upaya tersebut, sebab jumlah jemaah haji lansia yang ingin menu¬naikan ibadah haji cukup besar," ujarnya.

Menurut dia, sebelumnya berkembang usulan agar pemerintah tidak memprioritaskan jemaah haji yang sudah pernah berhaji. Karena, sesuai tuntunan Islam, kewajiban menunaikan ibadah haji hanya sekali selama hidupnya. Banyak jemaah Indonesia yang sudah melakukan ibadah haji lebih dari satu kali.

Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Ratu Siti Romlah mendukung langkah pemberian sisa kuota yang tersisa kepada jemaah haji lansia. Dia minta Kementerian Agama menyiapkan berbagai alternatif agar jemaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci, mengingat animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah cukup tinggi, sedangkan kuota terbatas.

"Banyak jemaah yang batal berangkat karena meninggal dunia, menunda keberangkatan karena suami atau istri wafat, sakit,dinas, dan alasan lain. Ini perlu diprioritaskan untuk diganti mereka yang sudah lansia dan berada di kuota urutan berikutnya ," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Pihaknya juga mendukung lobi Menag ke Arab Saudi untuk penambahan kuota. Bahkan, DPR akan melobi Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menambah kuota haji Indonesia.Apalagi jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237 juta orang. Jika mengacu pada kesepakatan OKI, Indonesia akan mendapatkan kuota 237.000 jemaah.■

Bahar Maksum

Dana Setoran Awal itu Uang Muka BPIH

Dana setoran awal pendaftaran jemaah calon haji merupakan uang muka BPIH. Ketika akan menunaikan ibadah haji, mereka membayar kekurangannya.



Direktur Pengelolaan Dana Haji, Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA.

Setoran dana awal pendaftaran jemaah calon haji merupakan uang muka untuk mendapatkan porsi kuota haji. Ini berarti yang bersangkutan terdaftar sebagai jemaah calon haji, sehingga pada saat akan berangkat menunaikan ibadah haji, yang bersangkutan harus melunasi kekurangannya sesuai dengan Peraturan Presiden yang menetapkan besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji).

Hal itu ditegaskan Direktur Pengelolaan Dana Haji, Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA sehubungan dengan masih banyaknya suara-suara pihak tertentu yang mempersoalkan keberadaan dana setoran awal pendaftaran jemaah calon haji. Saat ini, mereka yang baru mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji, harus menunggu hingga sekitar 5 tahun ke depan untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

"Bisa kita hitung, berapa bunga yang bisa didapat jika menabung Rp 25 juta, dan baru lima tahun mendatang bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi, nilainya cukup besar," ujar salah seorang yang mempersoalkan dana setoran awal tersebut.

Terhadap adanya sorotan yang demikian itu, Djunaidi justru menyarankan yang bersangkutan menabung saja di bank atau di tempat lain. "Kalau dananya sudah dikira cukup, baru daftar untuk menunaikan ibadah haji. Sudah pasti dia akan bisa berangkat lima tahun lagi atau bahkan bisa lebih," tegasnya dalam wawancara khusus dengan *Realita Haji* (RH) di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Dia mengumpamakan dana setoran awal itu sebagaimana uang muka seseorang yang mau beli sesuatu. Sehingga jika barang yang mau dibelinya sudah datang atau sudah jadi, maka yang bersangkutan harus bayar lunas. "Apakah uang muka itu dihitung bunganya? Kan tidak. Sama seperti dana setoran awal jemaah calon haji kita. Itu uang muka untuk mendapatkan porsi kuota haji. Jadi, tidak perlu dihitung bunganya," tegasnya lebih lanjut.

Sampai saat ini daftar tunggu jemaah calon haji mencapai 1,4 juta orang, dan, dana yang masuk rekening Menteri Agama sudah mencapai sekitar Rp 26 triliun. Dari seluruh dana tersebut, Rp 20 triliyun di antaranya ditabungkan dalam bentuk SUKUK Negara. Sedangkan sisanya ditabung dalam tabungan yang harus selalu standby untuk digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

Seperti diketahui, dengan kuota haji Indonesia yang berjumlah sekitar 210.000 orang, maka keperluan pembiayaannya akan mencapai sekitar Rp6 trilyun dengan perhitungan BPIH sekitar Rp30 juta. "Jadi, tabungan yang *standby* itu, yang bisa ditarik setiap saat, untuk kepentingan mendesak penyelenggaraan ibadah haji," tegas Djunaidi lebih lanjut.

Sedangkan tabungan SUKUK baru bisa dicairkan setelah 3 tahun dalam tabungan tersebut. Hanya saja, tabungan dalam SUKUK ini dijamin oleh pemerintah 100%. Jadi, beda sekali dengan tabungan atau deposito biasa, yang hanya dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya Rp2 miliar.

Dengan demikian tabungan dalam bentuk SUKUK ini sangat aman. "Ini dijamin oleh pemerintah, bukan oleh LPS. Sehingga, jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dana para jemaah calon haji ini tetap aman," ujar lelaki yang baru saja balik dari Saudi Arabia untuk kepentingan melakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011M.

Selain itu, katanya lebih lanjut,

pengelolaan BPIH dilakukan secara transparan dan akuntabel, antara lain dengan ditampilkannya laporan keuangan haji tahun berjalan di berbagai media cetak, baik di koran harian atau pun di majalah terkemuka di negara ini.

"Laporan itu juga dimuat di *Realita Haji*. Tujuannya, agar semua pihak bisa membacanya dengan mudah. Itu sesuai dengan amanah UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," tegas lelaki yang memulai karirnya sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Agama sejak tahun 1973 itu.

Djunaidi juga mengungkapkan, penyelenggaraan ibadah haji saat ini sangat efisien. Karena dari total BPIH yang digunakan untuk kepentingan para jemaah calon haji mencapai sekitar 90%, sedangkan untuk biaya operasionalnya hanya 4,9% serta DIPA 5,1%. "Kalau masih ada kelebihan dana operasional itu, ya masuk Dana Abadi Umat yang semuanya demi kepentingan umat," tegasnya kemudian.

Sedangkan penggunaan dana optimalisasi setoran awal jemaah calon haji, menurut sarjana akuntansi AANN, FE UI Jakarta ini, pertama untuk katering selama 8 hari para jemaah haji di Madinah. Kedua, untuk hotel transit di Jeddah serta kateringnya. Ke tiga, juga untuk katering ketika datang di bandara Jeddah dan Madinah serta untuk persiapan pulangnya.

Dana itu juga untuk katering selama di Arafah dan Mina (Armina). Selanjutnya untuk biaya pembuatan paspor para jemaah calon haji serta untuk biaya penginapan dan katering selama di asrama haji ketika mereka masuk asrama untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

Yang tidak kalah pentingnya, dana itu juga untuk asuransi para jemaah calon haji, pembuatan gelang identitas, biaya manasik haji.

"Itulah biaya yang diambilkan dari dana optimalisasi setoran awal jemaah calon haji. Penggunaannya jelas, semua untuk para jemaah calon haji," tegas mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama sebelum menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji.

Oleh karena itu, menurut Djunaidi, para jemaah calon haji hanya membayar empat masalah. Pertama ongkos pesawat, general servise, biaya penginapan di Makkah dan Madinah serta *living cost*. Dana yang disebut terakhir ini kembali kepada para jemaah sebesar 1,500 reyal Saudi Arabia atau sekitar US$400.

"General servise itu semacam pajak masuk Saudi Arabia. Setiap kepala dikenakan biaya sebesar US$276. Itu pun juga kembali kepada para jemaah haji dalam bentuk pelayanan dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia selama menunaikan ibadah haji," tegasnya.



Diryanhaj, Zainal Abidin Suphi (kedua dari kiri) menyaksikan warga mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji melalui Siskohat *on line*.

Kerjasama dengan KPK

Kementerian Agama saat ini mengadakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam usaha penggunaan dana BPIH agar benar-benar efisien serta sesuai ketentuan yang ada. Pembicaraan yang berlangsung selama ini mulai dari tingkat Kementerian, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal hingga tingkat direktorat.

Intinya, menurut Djunaidi, kerjasama itu sebagai upaya pencegahan atau langkah preventif agar pengelolaan dan penggunaan dana haji bisa sesuai ketentuan yang ada serta terhindar dari tindak pidana korupsi.

"Alhamdulillah, 48 point yang dulu dilansir oleh KPK berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, sudah clear dan bisa diatasi. Kini tinggal PP (Peraturan Pemerintah) atas pelaksanaan undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah yang harus dituntaskan," ungkapnya.

Djunaidi mengakui, proses penyusunan PP ini sangat sulit, karena harus mengkordinasikan semua instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Seperti dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet,Sekretariat Negara, para stage holder haji dan sebagainya. Ketentuan dari PP inilah sebagai payung hukum dari ketentuan peraturan tingkat menteri atau turunannya.

Lantas apa yang menjadi kendala kesulitan memproses lahirnya PP tersebut? Djunaidi mengatakan, karena hingga saat ini masih belum ketemu kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait. "Tetapi, kami sudah menentukan jadwal pembahasannya bersama dengan melibatkan pihak KPK. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, PP itu bisa kita lahirkan," ujarnya, penuh optimisme.■

Bahar Maksum

Purna Tugas 'Kamus Haji Berjalan'



Terhitung sejak 1 April baru lalu, Drs.H. Abdul Ghafur Djawahir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah purna tugas di Kementerian Agama RI.

Suatu hari, Afif Ubaidillah, seorang pengusaha penyelenggara haji khusus bertanya kepada Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni terkait dengan kebijakan perhajian. Maftuh Basyuni tidak mengetahuinya secara pasti. "Wah, coba tanyakan kepada Kamus Haji Berjalan, Abdul Ghafur Djawahir," kata Maftuh seketika itu juga.

Afif langsung mencari Ghafur. Sejak saat itu, di sekitar tahun 2005, gelar Abdul Ghafur Djawahir bertambah dengan 'Kamus Haji Berjalan'. Hal yang sama ketika *RH* bertanya kepada Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Husin Almunawwar tentang kebijakan perhajian yang dilakukan Menteri Agama di era Megawati antara tahun 2001 hingga 2004, ia juga menunjuk Abdul Ghafur. "Tanya saja Ghafur, dia yang paling tahu banyak soal itu," kata Said Agil.

Gelar itu memang pantas diberikan kepada Abdul Ghafur, anak keempat dari delapan anak pasangan Muhammad Djawahir yang pegawai KUA dan Zuhrotun Nisai asal Pekalongan. Sejak tahun 1977 ia mulai berkenalan dengan perhajian sebagai tenaga musiman mahasiswa ketika masih kuliah di Mesir sejak 1977 sampai 1979. Kesempatan itu dijadikan sebagai tempat belajar bagaimana melayani haji yang baik. Ia selalu memiliki keyakinan, ketika kita menanam



MA Ghafur Djawahir (tengah) bersama para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Ditjen PHU.



Sesditjen PHU, MA Ghafur Djawahir (kanan) saat menyampaikan paparan manajemen haji di Rusia.

> **"Tanya saja Ghafur, dia yang paling tahu banyak soal itu."**
> (Said Agil Almunawar).

kebaikan kepada siapa pun maka kita akan memanen hasilnya kelak. Maka, ia berusaha melayani dengan sebaik-baiknya jemaah dan berusaha sabar menghadapi semua persoalan.

Ketika ia bertugas sebagai tenaga musiman mahasiswa di Arab Saudi itu, Maftuh Basyuni (Menteri Agama RI 2004-2009) kebetulan menjabat sekretaris pribadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi, H. Djanamar Adjam yang padaa musim haji menjadi Kadaker Jeddah dan protokol. Ghafur merasa klop dengan Maftuh karena selalu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Bahkan, Maftuh kemudian mempercayakan Ghafur untuk melayani jemaah VIP yang terdiri dari menteri dan keluarganya, gubernur dan keluarganya, duta besar dan keluarganya, serta tamu penting lainnya.

Menurut Ghafur, penunjukan ini menjadi suatu kehormatan. Ghafur adalah sarjana Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 1977 ini lantas meneruskan di Universitas Al-Azhar, Mesir hingga tiga tahun. Selama tiga tahun itu pula ia selalu ditunjuk menjadi tenaga musiman mahasiswa. Setiap tahun PPIH selalu melibatkan para mahasiswa Indonesia di negara-negara Arab sebagai tenaga musiman.

Tenaga mereka sangat membantu pelaksanaan perhajian karena menguasai lapangan dan berbahasa Arab. "Waktu itu belum ada ONH Plus," kata Ghafur.

Pada musim haji tahun 1978, Ghafur seperti mendapat kehormatan ditunjuk memandu rombongan Gubernur DKI Jakarta H. Tjokropranolo yang waktu itu memiliki Sespri bernama H. Fauzi Bowo (gubernur DKI Jakarta sekarang). Selanjutnya, sepulang Tjokro, ia ditunjuk untuk mendampingi umrah Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo yang waktu itu menjabat sebagai Irjen Departemen Luar Negeri. Sarwo Edhi adalah mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sarwo Eddi waktu itu hanya umrah saja di musim haji, tidak melaksanakan haji.

Bekerja Baik

Pulang dari Mesir tahun 1980 ia langsung masuk ke lingkungan Departemen Agama (kini menjadi Kementerian Agama) dan ditugaskan di bagian Hubungan Luar Negeri di bawah

Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI. Kepala Biro Hukmas kala itu adalah HR Djatiwijono, SH, orang tua yang baik dan disiplin. Sementara atasan Ghafur langsung adalah Munawir Syakur. Menteri Agama kala itu adalah Alamsjah Ratu Perwiranegara, seorang jenderal bintang tiga.

Sejak ia masuk lingkungan Departemen Agama, ia selalu bekerja dengan baik dan mau belajar. Karirnya dimulai dari sesuatu yang tidak terduga. Suatu hari, Djatiwijono mencari staf di kantornya dengan memanggil nama satu persatu. Tapi, ternyata semua sudah pulang dan tinggal Ghafur sendiri. Maka, Ghafur diminta menghadap Djati. "Namamu siapa?" tanya Djati.

"Saya Ghafur." Djati langsung tersenyum. "Oh kamu yang namanya Ghafur. Kamu dipuji banyak orang cara menerima telepon dengan sopan," kata Djati. Ghafur ditanya, apa bisa membuat surat. Ghafur menjawab, bisa. Kemudian ia dicoba menulis. Ternyata, Djati puas dan memujinya. Sejak itu Ghafur sering mendapat tugas mengetik surat. Djati puas dengan hasilnya.

Tamu Resmi KBRI

Beberapa bulan kemudian, Ghafur secara tidak langsung diminta menghadap Sekretaris Menteri Agama RI Drs. H. A. Hafidz Dasuki, MA, yang sebenarnya mencari atasan Ghafur yang tengah berhalangan. Ghafur ternyata bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Sejak itu nama Ghafur mulai banyak dikenal di lapisan papan atas Departemen Agama RI. Bahkan, Mayjen TNI. H. Burhani Tjokrohandoko, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji kala itu memintanya langsung menjadi Sespri Dirjen.

Sejak bergabung dengan Burhani, ia banyak mengenal seluk beluk perhajian. Ia merasa sangat pas di lingkungan ini, karena sejak tahun 1977 ia telah berkenalan dengan pelayanan perhajian. Dengan pelayanan perhajian itu ia mengenal baik sejumlah tokoh. Seperti Gubernur DKI Tjokropranolo yang tak bisa melupakan budi baik Ghafur sehingga Tjokro pernah menawarkan Ghafur sebagai karyawan di lingkungan DKI Jakarta. Karena pernah menolong salah seorang saudaranya Dubes RI di Prancis, Muhammad Noor, maka Ghafur bisa diterima sebagai tamu resmi KBRI di Paris dan menempati Wisma KBRI Paris kala itu. Disamping itu, Ghafur pernah menolong jemaah haji dari Amerika Serikat, yang kemudian menjadi sponsor kunjungannya ke Amerika Serikat. "Ternyata Allah itu selalu membalas apa yang kita lakukan dengan ikhlas," tegas lulusan PGA Pekalongan ini.

Maka, Ghafur juga ikut menyaksikan peran perhajian dalam dakwah Islam. Kebijakan Alamsjah dalam mengislamisasikan para pejabat Orde Baru kala itu, sangat strategis untuk perjuangan Islam. Ia undang beberapa tokoh untuk menunaikan ibadah haji, antara lain Ketua Umum Golkar, H. Amir Murtono sejumlah menteri dan perwira tinggi militer dan gubernur.

Kemudian Munawir Sjadzali meneruskan kebijakan Alamsjah dengan memperkenalkan *free seat*: haji tanpa biaya penerbangan yang diberikan untuk kalangan tertentu yang tujuannya untuk dakwah. Dengan menjadi haji, posisi seseorang akan lebih baik dan tak lagi memusuhi Islam.

Sejak itu Golkar membentuk Majelis Pengajian Wanita Al-Hidayah dan Majelis Dakwah Islam (MDI) yang hingga kini berjalan baik. Malah, waktu itu muncul istilah Haji Abubakar (haji atas budi baik Golkar).

Nama Ghafur semakin menanjak terutama setelah Konferensi International Media Massa Islam (proyek Rabithah Alam Islami, Arab Saudi) tahun 1981 yang kala itu dihadiri ulama besar Arab Saudi Syaikh Ali Al-Harakan, Sekjen Rabithah Alam Islami. Ghafur menjadi pendamping para tamu kehormatan. Peristiwa itu yang diketuai H. Harmoko yang kala itu masih menjabat sebagai ketua umum PWI Pusat. Konferensi inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal hubungan semakin baik antara dunia Islam dengan Indonesia dan bahkan berhasil memunculkan semangat beragama di kalangan pejabat RI, termasuk Presiden Soeharto sendiri. Sebab, sejak Orde Baru, Indonesia tak pernah menghadirkan presiden dalam Konferensi Negara-negara Islam (OKI).

Sejak tahun 1991 Ghafur mulai menemukan posisi di haji sebagai Kasubag Kepegawaian Haji. Kemudian menjabat Kasubag Informasi Haji, Kabag Perencanaan, Kabag Program dan Perundang-undangan Haji, Kabag Perencanaan dan Keuangan dan Kabag Perencanaan Sistem Informasi Haji.

Kemudian naik menjadi eselon dua sejak tahun 2007 sebagai Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (kini berubah menjadi Direktur Pengelolaan Dana Haji) yang ternyata hanya dijabatnya setahun. Sebab, setahun kemudian ia harus menggantikan seniornya Drs. H.A. Chunaeni Saleh sebagai Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang memasuki masa pensiun.

"Oh kamu yang namanya Ghafur. Kamu dipuji banyak orang cara menerima telepon dengan sopan."

(HR Djatiwijono, SH)



MA Ghafur Djawahir dan istri Ida Saida foto bersama Dubes RI di Syria, H. Muzamil Basyuni usai memberikan sosialisasi haji di Damaskus.

> Nama Ghafur semakin menanjak terutama setelah Konferensi Interna-tional Media Massa Islam (proyek Rabithah Alam Islami, Arab Saudi) tahun 1981.

Pentas Haji

Pantas jika kemudian Ghafur menjadi saksi mata perjalanan haji di Indonesia selama ini. Orang boleh menguasai manasik haji di luar kepala, tapi tak menguasai seluk beluk perhajian termasuk manajemen, diplomasi perhajian, bisnis perhajian, dan lain sebagainya. Ghafur telah menyaksikan detik perdetik perjalanan haji sejak Menteri Agama Alamsjah, Munawir Sjadzali, Tarmizi Taher, Quraish Shihab, Malik Fajar, Tholchah Hasan, Said Agil Almunawar, Maftuh Basyuni, hingga Suryadharma Ali.

Begitu juga ia tahu persis kendali perhajian di bawah para Dirjen Haji (sejak masih bernama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji hingga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) sejak Burhani Tjokrohandoko, beralih kemudian kepada Abdul Qadir Basalamah, Andi Lolotonang, Amidhan, Ahmad Ghozali, Mubarak, Taufik Kamil, hingga Slamet Riyanto.

Manajemen haji digodok melalui uji coba berkali-kali. Berkali-kali mengalami salah, namun kesalahan itu justru menjadi jalan menuju pelayanan yang lebih sempurna. Kasus katering yang semula gagal, kemudian ditebus dengan pelayanan yang lebih baik dan harga lebih murah. Kini, jemaah haji telah menikmati suatu kematangan manajemen yang dikelola Kementerian Agama RI yang telah mendapat ISO 9001:2008.

Jemaah haji Indonesia yang besarnya sekitar 220.000 jemaah, menjadi jemaah dengan jumlah terbesar di dunia. Bahkan, menurut Menteri Agama Tarmizi Taher, pemberangkatan sejumlah 160.000 jemaah waktu itu sama dengan pengiriman tentara sekutu ke Irak tahun 1990. Kesulitan dan riuhnya persiapan juga sama dirasakan. Bedanya, tentara sekutu terlatih dan jemaah haji sebagian besar warga pedesaan yang awam dengan penerbangan. Di sini sulitnya haji sehingga mendapat acungan jempol sendiri dari berbagai kalangan. Pemerintah Arab Saudi berkali-kali memuji manajemen perhajian Indonesia sebagai yang terbaik.

Hasilnya, pihak luar negeri mulai mengakui dan melirik manajemen haji ala Indonesia. Iran, Turki, dan Rusia tertarik dengan manajemen

haji itu. Ghafur yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ditunjuk oleh Menteri Agama dan Dirjen Haji sebagai pimpinan tim yang memberikan pelatihan penyelenggaraan haji di Rusia. Kejadian itu terjadi antara tanggal 5 hingga 7 Juli 2010 tahun lalu. Ghafur melatih petugas haji Rusia yang terdiri dari propinsi Kazan dan provinsi Rusia yang selama ini dikenal sebagai propinsi yang paling banyak mengirimkan jemaah haji. Rusia setiap tahun mengirimkan jemaah sebanyak antara 24.000 hingga 30.000 jemaah haji setiap tahunnya.

Ghafur dan tim menyampaikan pelatihan yang meliputi tiga hal. Pertama, tentang kebijakan umum penyelenggaraan haji. Kedua, pemaparan tentang aspek-aspek penyelenggaraan haji yang menyangkut persiapan di tanah air, dan Ketiga, tentang operasional haji di Arab Saudi, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak di Arab Saudi, seperti muassasah, naqabah, baladiyah dan lain sebagainya.

Ketika Ghafur berkunjung ke Australia, penyelenggara hajinya yang diwakili oleh Imam Besar Masjid Canberra, meminta agar para jemaah hajinya dapat bergabung dengan Indonesia. Demikian pula ketika di Jepang, pimpinan Islamic Congres Jepang, Prof. Dr. Sauqy Futaki meminta haji Jepang bergabung dengan Indonesia.

Dalam penilaian mereka, jemaah haji Indonesia yang banyak itu lancar terbang ke Tanah Suci dan tertib melaksanakan ibadah haji selama di Arab Saudi. Demikian pula tertib dalam pemulangannya.

"Negara lain mencermati kita, ternyata pengelolaan haji kita jauh lebih baik. Jemaah kita juga terkenal baik, ramah dan disiplin. Mereka mengagumi itu semua," kata Ghafur yang 31 tahun bergelut di perhajian.

Dekat Wartawan

Ghafur, sejak lama dikenal dekat dengan semua orang. Ia bisa masuk ke semua lingkungan tanpa pernah risih. Siapa pun dan dari golongan mana pun akan menerima Ghafur. Ghafur beberapa kalipernah mewakli Menteri Agama RI atau Drjen Penyelenggaraan Hajid an Umrah dalam acara yang terkait dengan perhajian. Orang tak asing dengan Ghafur karena sosok itu selalu tampil prima di televisi dan radio, menjawab tuntas pertanyaan masyarakat dan menjelaskan dengan gamblang persoalan haji.

Pantas jika nama Ghafur selalu melekat dengan perhajian Indonesia. Selama bertahun-tahun Ghafur menjadi jembatan antara Pemerintah (Kementerian Agama) dan DPR dalam pembahasan masalah haji. Dengan dibentuknya lembaga baru DPD (Dewan Perwakilan daerah) tahun 2004, maka Ghafur perperan sebagai pe-

> Negara lain mencermati kita yang ternyata pengelolaan haji kita jauh lebih baik. Setiap tahun mampu memberangkatkan 200 ribu jemaah lebih, tanpa masalah.



MA. Ghafur Djawahir saat mendampingi Irjen Departemen Luar Negeri RI Letjen Sarwo Edhi Wibowo ketika menunaikan umrah tahun 1979. Sarwo Edhi adalah mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

main jangkar yang bisa menghubungkan semua pihak tekait dengan perhajian.

Bagi pers Ghafur adalah sosok yang paling menyenangkan. Kapan pun wartawan meneleponnya, meski ia tengah nyenyak tidur setelah letih bekerja seharian, ia akan menerima dan menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan, jika perlu, ia mendatangi sekelompok wartawan di Media Center Haji (MCH) lantai dasar kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bagi Ghafur, wartawan adalah mitra utama dalam sukseskan perhajian.

Informasi perhajian tak bisa merata jika tanpa melibatkan media massa. Ia juga kerap mendatangi media massa utuk menjelaskan seluk beluk perhajian. Memahamkan perhajian memang sulit apalagi sudah ada stigma bahwa haji itu menguntungkan. Tapi, setelah semua dijelaskan dengan gamblang, semua bisa memahami. "Tidak mudah mengurus haji jika kita tidak ikhlas melakukannya," katanya.

Pers senang karena Ghofur selalu bicara blak-blakan. Ia sabar menjelaskan perhajian. Satu hal yang dicatat pers yang kerap meliput di lingkungan Kementerian Agama adalah sikap sabar Ghafur dan tak pernah marah kepada siapa pun.

Ghafur memang hanya baut kecil dalam sistem perhajian. Tapi, tanpa baut itu perhajian bisa tidak berjalan normal. Namun, betapapun, bukan berarti tanpa Ghafur perhajian tak berjalan semestinya. Bagaimanapun juga, Ghafur juga telah mengkader sejumlah orang secara tidak langsung yang kelak akan siap menjadi penggantinya. Sebab, sebaik-baik pemimpin adalah orang yang mampu menyiapkan kader pengganti di belakangnya.

Apalagi, Ghafur tengah menanti tugas baru sebagai anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Ia lulus sebagai 18 orang yang berhak dipilih Presiden untuk jabatan itu. ■

Musthafa Helmy dan Bahar Maksum

MOHON DIRI

Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti kami sebagai Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Perkenankanlah kami dan keluarga mohon diri disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik.

Kami dan keluarga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekhilafan serta kekurangan yang telah kami perbuat, baik dalam hubungan dinas maupun di luar dinas.

Pada kesempatan ini pula kami mohon do'a dan dorongan untuk melaksanakan tugas keagamaan maupun kemasyarakatan.

Jakarta, 4 April 2011
Hormat Kami,

MA. Ghafur Djawahir
Ida Saida Nasiroh





Jemaah haji wanita Indonesia tengah menunggu upacara pemberangkatan.

Jemaah Haji Wanita Miliki Kesehatan Lebih Prima

54,69% dari jumlah jemaah haji Indonesia adalah wanita dan mereka ternyata memiliki kesehatan lebih prima dibanding jemaah laki-laki.

Musim haji 2010 baru saja berakhir. Secara umum, penyelenggaraan ibadah haji berlangsung baik dan lancar. Kini para jemaah haji telah kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2010, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri dari 197.500 jemaah haji reguler dan 23.500 jemaah haji khusus (plus). Pemerintah setiap tahunnya selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayananan yang prima kepada para jemaah haji khususnya jemaah haji regular. Karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Sedangkan para jemaah haji khusus dilayani secara optimal oleh perusahaan yang memberangkatkannya.

Ada fenomena menarik yang berlangsung dari tahun ke tahun, yaitu jumlah jemaah haji wanita selalu lebih banyak dibanding jemaah haji pria. Pada musim haji 2010, dari 197.500 jemaah haji reguler yang dilayani pemerintah (Kementerian Agama), sebanyak 54,69% merupakan jemaah haji wanita.

Yang juga menggembirakan, pada umumnya jemaah haji wanita memiliki kesehatan lebih prima dibanding jemaah haji laki-laki. Hal itu tampak dari jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. "Hingga berakhirnya musim haji tahun 2010, dari 413 jemaah haji Indonesia

yang meninggal, sebanyak 178 merupakan jemaah haji wanita, sedangkan sisanya yang sebagian besar adalah jemaah haji laki-laki, yakni 235 orang," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Abdul Ghofur Djawahir.

Pertanyaannya adalah mengapa jemaah haji wanita memiliki kesehatan lebih prima? Menurut, dr Mawardi Edi, yang pada musim haji 2010 menjabat sebagai Wakil Kepala Daker Madinah bidang Kesehatan, dari segi daya harapan hidup memang wanita lebih tinggi dibandingkan pria. "Dari segi kromosom wanita lebih kuat," kata dr Mawardi.

Selain itu, lanjutnya, angka harapan hidup wanita lebih tinggi dari pria yakni 70 tahun untuk wanita dan 68 tahun untuk pria. Menurut dr. Mawardi, ada empat faktor yang menyebabkan mengapa wanita lebih tinggi daya tahan kesehatannya dibandingkan pria.

Faktor pertama, medical seeking wanita lebih tinggi dibandingkan pria. "Wanita jika ada jerawat di wajah pasti khawatir dan langsung bertanya ke dokter, berbeda dengan pria yang lebih santai," terang dr Mawardi.

Faktor kedua, tandas ahli epidemologi ini, sifat hormonal wanita lebih stabil dibandingkan pria. Ketiga, faktor laki-laki lebih dibebankan fisik dibandingkan wanita. "Terakhir pria lebih sering mengalah. Misalkan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih berat," terang dr. Edi.

Diberi Perhatian Khusus

Karena jemaah haji wanita jumlahnya lebih besar, wajar saja jika kemudian Kementerian Agama memberikan perhatian khusus dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Menurut Abdul Ghofur Djawahir, ada beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk memberikan layanan optimal kepada para jemaah haji wanita. Pertama, dibentuknya kelompok-kelompok regu yang terdiri dari sekitar 10 jemaah haji pria dan wanita, yang dipimpin oleh seorang Ketua Regu (Karu). Pada tingkat di atasnya, dibentuk kelompok-kelompok rombongan yang terdiri dari 3 s.d 4 regu, yang dipimpin oleh Ketua Rombongan (Karom).

Selanjutnya, kelompok-kelompok rombongan itu tergabung dalam kelompok terbang (kloter), yang dipimpin oleh ketua kloter. Dalam satu kelompok terbang, terdiri dari sekitar 450 jemaah haji atau kurang lebih 10 s/d 15 kelompok rombongan. Dengan diberlakukan sistem berlapis seperti itu, maka akan memudahkan koordinasi, keamanan, maupun pemantauan terhadap para jemaah haji, terutama jemaah haji wanita. Kalau ada jemaah haji wanita yang menghadapi masalah, misalnya sakit mendadak atau tersesat, maka dalam waktu cepat akan teratasi.

Banyaknya petugas kesehatan haji wanita ini untuk memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji wanita, karena mereka pada umumnya lebih sabar.

Kedua, sebagian besar petugas kesehatan haji (dokter dan paramedis) adalah wanita. Menurut Abdul Ghofur, dari 1.779 petugas kesehatan haji pada tahun 2010, sebagian besar atau sekitar 65% adalah wanita, sisanya yang 35% pria. Banyaknya petugas kesehatan haji wanita ini untuk memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji wanita, karena mereka pada umumnya lebih sabar. Para jemaah haji wanita juga akan merasa lebih nyaman kalau yang melayani mereka adalah dokter atau paramedis wanita.

Ketiga, seluruh anggota PPIH dibekali pelatihan khusus untuk memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji wanita, apalagi kebanyakan mereka sudah berusia lanjut. Pembekalan itu diberikan sebelum PPIH berangkat ke Tanah Suci.

"Berbagai langkah yang ditempuh itu merupakan bentuk komitmen yang tinggi dari Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan prima kepada para jemaah haji wanita. Yang juga mengagumkan, para jemaah haji wanita pada umumnya bersikap lebih patuh dan tertib dalam menjalankan keseluruhan rangkaian pelaksanaan ibadah haji," ujar Ghafur.■

Nashir Maqsudi


Salah satu aktivitas jemaah haji wanita Indonesia di Arab Saudi.

Menyoroti RUU Tata Kelola Dana Haji

Usaha pengelolaan dana haji kini memasuki tahap legalisasi untuk melindungi dana yang merupakan milik para jemaah calon haji.

Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Tata Kelola Dana Haji (TKDH). Hanya saja, setelah dibahas dalam internal Kementerian Agama, khususnya dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), ditemukan beberapa masalah yang sangat mendasar yang tidak sesuai dengan keberadaan dana haji tersebut.

Sebagai objek dari RUU ini adalah dana setoran awal jemaah calon haji yang kini mencapai sekitar Rp28 triliun yang merupakan dana para jemaah calon haji. Sementara dalam RUU tersebut, dinyatakan, karena dana itu dikelola oleh negara, maka dana itu sebagai milik negara (Pasal 9).

''Inilah kekeliruan mendasar dari rancangan undang-undang itu,'' tegas Direktur Pengelolaan Dana Haji (PDH), Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA kepada *Realita Haji* di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dana tersebut kini masuk dalam rekening Menteri Agama. Tetapi, itu bukan berarti dana tersebut milik negara. Dan, pengelolaannya seratus persen demi kepentingan para jemaah calon haji. Sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tahun 2008) secara tegas menyatakan, itu bukan dana milik negara atau pun dana APBN.

''Menteri Agama hanya diberi hak untuk menampung dana itu dalam rekeningnya. Penggunaannya pun harus persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Seratus persen dana tersebut digunakan untuk kepentingan para jemaah calon haji karena dana itu milik mereka,'' tegas Djunaidi lebih lanjut.



Direktur Pengelolaan Dana Haji, Drs. A. Djunaidi saat menjelaskan RUU Pengelolaan Keuangan Haji.



Gedung Bank Indonesia: Di sini dana haji disimpan dalam SUKUK negara.

Oleh karena itu, menurut Djunaidi, UU Pengelolaan Dana Haji itu harus melihat secara jernih, bahwa dana itu seratus persen milik jemaah calon haji dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji bagi mereka.

Hal itu perlu ditegaskan oleh Djunaidi, karena dia melihat RUU tersebut, lebih menitikberatkan pengelolaannya secara bisnis dan komersial. Padahal, pengelolaan dana secara bisnis, sudah pasti akan mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa rugi.

''Lantas kalau rugi, siapa yang akan menanggung. Apakah negara mau menanggung? Tidak mungkin,'' tegasnya seraya menambahkan bahwa pasal masalah itu belum diatur dalam RUU tersebut.

Lain halnya dengan Tabung Haji Malaysia yang mengelola dana jemaah hajinya secara komersial dijamin oleh negara tersebut. Menurut Djunaidi, hal itu dimungkinkan, karena Malaysia menganut sebagai negara Islam. ''Negara kita kan bukan negara Islam,'' tegasnya.

Tabung Haji Malaysia (THM), diakui oleh Djunaidi pernah mengalami kerugian yang sangat besar, yakni bersamaan dengan krisis ekonomi melanda Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Namun demikian, kerugian itu semuanya ditanggung oleh pemerintahnya. Karena undang-undang negara itu, memang mengaturnya demikian.

Oleh karena itu, Djunaidi kembali mengingatkan, bahwa RUU tersebut penekanannya bukan kepada pengelolaan dana itu secara komersial, melainkan harus mengutamakan pelayanan kepada para jemaah calon haji, sehingga mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang, khusyuk, sehingga bisa menjadi haji mabrur.

Kenapa materi RUU tersebut lebih menitikberatkan pada pengelolaan Keuangan Haji secara komersial? Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama ini mengaku tidak tahu.

''Saya baru tahu materi RUU itu, setelah diajak membahasnya bersama-sama di internal Ditjen PHU. Sebelumnya saya tidak tahu. Setelah tahu materinya seperti itu, teman-teman di Ditjen PHU sepakat untuk mengadakan koreksi secara menyeluruh,'' tegasnya.

Hanya saja, Djunaidi belum bersedia merinci, materi yang diinginkan dalam RUU Pengelolaan Dana Haji itu. Dia hanya menjelaskan secara umum materi RUU tersebut harus mengutamakan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah calon haji. Sementara pengelolaan Keuangan Haji secara komersial harus menitikberatkan kepada terjaminnya keamanan dana tersebut.

''Jangan sampai pengelolaan dana itu secara komersial lantas mengalami kerugian hingga menjadikan ada jemaah calon haji tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ini harus menjadi perhatian serius. Karena selama ini, belum pernah ada jemaah calon haji yang telah mendapatkan porsi kuota haji tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji,'' tegas lelaki yang berkarir di Kementerian Agama sejak tahun 1973.

Djunaidi mengakui, adanya kecenderungan RUU itu lebih menitikberatkan kepada pengelolaan Keuangan Haji secara komersial, karena dana tersebut sangat menggiurkan. Bayangkan, katanya lebih lanjut, Keuangan Haji sebesar Rp 28 triliun, sebagai dana segar. Para pengusaha dan para investor melihat dana itu hanya didepositokan atau disimpan dalam bentuk SUKUK Negara, jelas kurang bisa mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Namun demikian, Djunaidi memberikan respon positif atas asas pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam RUU tersebut. Yakni, berasaskan Syariat Islam, manfaat, keadilan dan akuntabel serta transparan.

Materi RUU TKDH

Rancangan Undang-Undang Tata Kelola Dana Haji (RUU TKDH) ini terdiri atas 6 bab dan 30 pasal yang dilengkapi dengan penjelasan pasal demi pasal RUU tersebut.

Bab pertama berisi ketentuan umum sebagai penjelasan mengenai definisi-definisi dalam materi RUU tersebut. Ini terdiri atas 4 pasal yakni pasal 1 hingga pasal 4. Sedangkan Bab II mengenai pengelolaan keuangan haji (PKH) yang terdiri atas 6 pasal, yakni mulai dari pasal 5 hingga pasal 10. Sedangkan Bab III mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji mulai dari pasal 11 hingga pasal 25.

Bab IV mengenai pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji, yakni pasal 26 dan pasal 27. Bab V mengenai ketentuan peralihan, yakni pasal 28 dan pasal 29. Bab VI merupakan pasal penutup, yakni pasal 30. ■

Bahar Maksum

Ketika Jemaah Haji Terpisah Rombongan

Pada setiap musim haji hampir dapat dipastikan banyak terdapat jemaah terpisah rombongan, yang tersesat tidak dapat menemukan pemondokannya. Jemaah ini sering disebut dengan "Jemaah Sesat" artinya jemaah yang tersesat jalan. Konotasi jemaah sesat dirasa tidak manusiawi, masa iya ada jemaah haji kok sesat dan tidak ada seorang pun diantara jemaah mau disebut jemaah sesat. Pada musim haji tahun 1431H/2010M Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Cepi Supriatna berinisiatif mengganti istilah "jemaah sesat" menjadi "jemaah terpisah rombongan".

Lokasi kantor Sektor 6 Daerah Kerja Makkah musim haji tahun 1431H/2010M, cukup strategis mengakibatkan menjadi tujuan "favorit" bagi jemaah haji yang terpisah rombongan, baik yang berasal dari Sektor lain maupun internal Sektor 6. Rata-rata jemaah yang terpisah rombongan sebanyak ± 40 orang per hari, hal ini menyebabkan kegiatan antar jemput jemaah volumenya cukup tinggi. Sementara itu kendaraan yang ada hanya berupa sebuah mobil Suzuki Carry dengan daya tampung sangat terbatas. Beruntung ada mobil jenis Coster yang disediakan oleh Daker yang sesekali dapat dipanggil untuk mengangkut jemaah yang terpisah rombongan dalam jumlah yang banyak, akan tetapi mengingat jumlah mobil Coster yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang harus diangkut, seringkali terjadi daftar tunggu yang cukup lama di kantor sektor – rupanya daftar tunggu tidak hanya berlaku di Tanah Air ketika menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci, tetapi berlaku pula ketika sudah di Tanah Suci menunggu giliran di angkut ke pemondokan mereka-

Ada peristiwa yang cukup mengenaskan, ketika petugas antar jemput jemaah terpisah rombongan kena tonjok di dalam mobil Carry yang ditumpangi oleh jemaah haji yang terpisah rombongan. Peristiwanya itu terjadi ketika jalan-jalan di Kota Makkah mulai padat dan macet. Sopir pengantar jemaah terpisah rombongan berupaya untuk dapat menempuh perjalanan dengan waktu sesingkat mungkin, mengingat kendaraan telah dinanti oleh para jemaah haji yang sudah masuk "daftar tunggu".

Pada situasi padan dan macer pengemudi jemaah terpisah rombongan tentu saja tidak dapat memacu kendaraannya dengan kencang, disamping usia mobil yang digunakan sudah tua dan banyak telah memasuki masa udzur - di Jakarta mobil jenis ini Suzuki Carry semacam ini sudah lama punah. Pengemudi jemaah terpisah rombongan tahu persis jalur jalan yang tidak macet, biasanya merupakan jalan-jalan alternatif atau yang sering disebut dengan "jalan tikus".

Untuk mempersingkat waktu tempuh pengemudi jemaah terpisah rombongan sering menempuh jalan-jalan tikus, walaupun jaraknya relatif lebih jauh karena agak melingkar, namun dapat dipastikan bahwa jarak tempuh menjadi singkat.

Pada suatu ketika sopir jemaah terpisah rombongan membawa beberaopa orang jemaah yang terpisah rombongan, ketika mobil masuk terowongan tiba-tiba Si pengemudi ditonjok dari belakang, bahkan setirnya mau dikuasai, sehingga mobil pun oleng, akan tetapi Si pengemudi tidak dapat menghentikan kendaraan di tengah terowongan, di samping membahayakan lalu lintas, juga berbahaya bagi jemaah yang di dalam mobil. Dengan terpaksa mobil dijalankan terus sampai keluar terowongan, baru kemudian dipinggirkan untuk berhenti.


H. Shoim Munawar (kiri) saat berada di Masjidil Haram.

Ada dua persoalan yang dihadapi oleh pengemudi, dia khawatir kalau mobil dihentikan jemaah yang dibawa akan keluar dan meninggalkan mobil, hal ini tentu saja akan dapat menimbulkan persoalan baru, karena kelak petugas harus mencarinya sampai dapat, kekhawatiran kedua takut jemaah tersebut mengamuk.

Setelah berdialog ternyata jemaah tersebut bukan termasuk katagori hilang ingatan apalagi orang gila, akan tetapi penalarannya masih normal. Ketika ditawarkan apakah jemaah mau naik taksi atau diantar dia tidak menjawab, maka mobil pun dijalankan lagi, ternyata jemaah tersebut hendak menonjok lagi pengemudi, beruntung ada jemaah lain yang menghalanginya dan beruntung pula lokasi pemondokan telah dekat. Setelah diantar di depan rumahnya jemaah tersebut tersenyum lega dan minta maaf atas kelakuannya menonjok Sang Pengemudi. Enak juga jadi jemaah haji Indonesia, bila terpisah rombongan diantar jemput dan sekaligus dapat "menonjok petugas". Kasihan Si pengemudi. ■

H. Shoim Munawar

Visa Umrah yang Semakin Mahal

Umrah semakin mahal karena para calo menaikkan visa umrah menjadi US$250 dari US$100 sebelumnya.



Jemaah haji Indonesia sedang melaksanakan umrah.

Biro-biro penyelenggara umrah dirugikan karena tertundanya pemberangkatan jemaah umrah pada bulan Februari lalu. "Kami harus kehilangan US$ 200 perjemaah karena pembatalan tiket yang sudah OK," kata seorang pengusaha umrah.

Ia tinggal menghitung kerugian. Karena bulan Februari lalu ia seharusnya memberangkatkan 76 jemaah umrah. Selama bulan Februari itu hampir semua visa umrah tak keluar dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.

Di samping itu, hampir semua penyelenggara umrah dan haji juga mengeluhkan kenaikan biaya untuk mengurus visa umrah yang dikenakan provider pelaksana visa, yang semula hanya US$ 100 kini menjadi US$250 (sekitar Rp 2,2 juta). Kenaikan drastis biaya visa umrah diduga akibat permainan para calo visa yang memanfaatkan kondisi ketika banyak Muslimin yang berencana pergi umrah. Hal ini semakin membebani penyelenggara umrah dan juga jemaahnya.

"Para provider visa umrah dengan seenaknya menaikkan biaya visa umrah akibat permintaan visa yang tinggi. Harga untuk mendapatkan visa juga naik drastis," kata Wakil Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), H. Rustam Sumarna, di Khalifah Tour, Selasa, 15 Maret lalu.

Menurut Rustam, tidak ada aturan yang mengikat termasuk sanksinya sehingga provider visa di Indonesia dengan seenaknya menaikkan biaya untuk mendapatkan visa umrah. "Pihak biro umrah tak bisa berbuat banyak karena visa umrah merupakan hal vital yang menentukan berangkat atau tidaknya jemaah umrah," katanya.

Keluhan serupa disampaikan juga

Direktur Qiblat Tour H. Wawan Misbach dan Pimpinan Almanar Tour KH. Ujang Muhammad. "Kami sudah menjual paket umrah bulan-bulan sebelumnya sehingga kesulitan menaikkan harganya kembali untuk mengimbangi kenaikan harga visa umrah. Jemaah umrah juga menolak untuk menambah biaya sehingga kami serba salah," kata H. Wawan.

Menurut H. Wawan, di Kemenag pusat dan Kemenag kabupaten/kota terdapat pejabat yang mengurusi umrah, namun tidak berfungsi sama sekali. "Kalau biaya pengurusan visa umrah diserahkan kepada pasar, maka kondisinya seperti saat ini. Dengan seenaknya sendiri pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan visa menaikkan biaya visa umrah," katanya.

Umrah kinu dijadikan kerinduan kaum muslimin kepada Ka'bah. Sebab, untuk melaksanakan haji sudah tak mjungkin karena daftar antre yang sudah panjang. Bagi kaum muslimin yang telah melaksanakn haji, umrah memang menjadi pilihan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menutup kerinduan ke Baitullah.

Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia mendapat kuota haji paling banyak sedunia, yaitu 221 ribu jemaah tiap tahun yang selalu saja tak bisa menampung gairah umat pergi ke Baitullah. Kini, daftar tunggu untuk haji sudah mencapai lebih 1 juta jemaah. Artinya, orang yang mendaftar haji sekarang minimal dalam lima tahun baghkan bisa delapan tahun baru bisa berangkat.

Animo tinggi

Animo umrah tak kalah dari haji. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) Baluki Ahmad mengatakan, animo berumrah setiap tahun terus meningkat dan mencapai puncaknya di 2011. Lonjakan jemaah umrah terjadi di awal tahun hingga bulan Rabiul Awal.

Meskipun belum diketahui angka secara pasti, tetapi minimal tiap hari lima pesawat reguler memberangkatkan jemaah umrah. Untuk Garuda Indonesia saja, Baluki memisalkan, mengangkut tidak kurang dari 800 jemaah umrah per hari. "Semangat umrah tinggi, tak lagi hanya di perkotaan tapi juga mulai dialami kaum muslimin di pedesaan," kata Balukhi.

Tentu saja para pengusaha biro perjalanan haji dan umrah berpesta. "Tapi itu tahun lalu," sergah Baluki. Kini, situasinya berbeda. Insiden pembatalan pemberangkatan umrah gara-gara lamanya pengurusan visa Arab Saudi kini menjadi persoalan pelik yang membuat pusing Baluki dan pengusaha umrah lainnya.

Frekuensi kejadian pembatalan berangkat umrah ini meningkat di awal tahun. Misalnya terdapat 300 jemaah gagal berangkat dengan Batavia Air, 259 jemaah dengan Lion Air, dan 180 orang dengan Garuda Indonesia.

Setahun silam, Abdullah Hasan, warga Langsa, Aceh Timur, bersama 71 lainnya yang terdaftar melalui PT Annajwa Islamic Center mesti menanggung kecewa lantaran gagal berumrah karena visa umrah tak kunjung keluar dari Kedutaan Arab Saudi. Padahal, saat menerima kabar penundaan itu mereka sudah berada di Bandara Polonia, Medan. Artinya, dia harus merogoh kantung lagi untuk bisa kembali ke Aceh.

Komunikasi yang kurang lancar dari penyelenggara umrah kepada para jemaah turut memperburuk kondisi. Hal ini mulai terbukti, diperkirakan ribuan jemaah umrah tertunda meminjakkan kaki di Tanah Suci.

Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Ahmad Kartono mengatakan, kendala visa yang dihadapi saat ini lantaran ada perbaikan sistem di Kementerian Haji Arab Saudi. Persoalan serupa tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Di dua negara jiran itu, banyak jemaah yang terkatung-katung dan tertunda umrahnya. Sementara tiket untuk pemberangkatan berikutnya juga padat dan sulit mendapatkan seat

Ahmad Kartono mengimbau biro perjalanan umrah tidak merugikan jemaah dengan tidak memberangkatkan jemaah selama belum ada sinyal visa keluar dari Kedutaaan Arab Saudi. Selama visa belum keluar, sekalipun yakin visa akan dikeluarkan, hendaknya tidak mudah melakukan pemberangkatan, karena tiket pesawat juga persoalan sendiri. Dia mengingatkan, pemerintah tak segan-segan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. "Sudah ada 30 biro perjalanan yang kita bekukan," kata Kartono.

Menurut Baluki, total kerugian akibat penundaan keberangkatan bisa mencapai 700 dolar AS per jemaah dari total biaya umrah yang biasanya berkisar 1.750 dolar AS per orang. Itu belum termasuk rupiah seharga tiket pesawat satu kali jalan yang dinyatakan hangus oleh maskapai penerbangan "Tinggal dikali saja berapa jemaah yang gagal berangkat," kata dia.

Menurut Baluki, tiap proses pengurusan umrah telah dijadwalkan dan diperhitungkan secara matang oleh biro perjalanan guna menghindari berbagai kemungkinan terburuk, termasuk visa yang urung dikeluarkan oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Namun, Baluki mengungkapkan, penundaan keberangkatan lebih diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Sayangnya, hal ini tak pernah terkomunikasikan kepada penyelenggara.

Misalnya kebijakan membatasi kuota jemaah umrah kepada operator resmi penyelenggara ibadah haji dan umrah di Arab Saudi. Padahal, melalui operator itulah biro perjalanan haji dan umrah seluruh dunia mengadakan kontrak untuk memroses visa dan memberangkatkan jemaah haji maupun umrah. Akibatnya, banyak permintaan visa yang menumpuk di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.

Karena itu, Suhirlan, dari perwakilan PT Alia Travel, Jakarta, mengatakan bahwa problem gagal berangkat tidak semata-mata persoalan siap ataukah tidak travel yang bersangkutan. Tetapi kembali ke masalah kebijakan visa Pemerintah Arab Saudi yang hampir tiap tahun selalu berubah tanpa ada sosialisasi jelas. "Tapi saya kira, problem keterlambatan visa lambat laun akan selesai sekitar bulan April."■

Musthafa Helmy



Syahlan Arief (kanan) saat mendampingi Kasubdit Bimjah, Asnawi Muhammadiyah dalam satu acara.

Sertifikasi Pembimbing Jemaah Haji

Kementerian Agama akan menjadikan pembimbing jemaah haji diusulkan sebagai pejabat fungsional. Untuk itu para pembimbing haji harus disertifikasi.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) kini menyelenggarakan test sertifikasi pembimbing ibadah haji. Mereka akan menjadi pembimbing haji yang dilaksanakan di KUA-KUA (Kantor Urusan Agama) bagi jemaah calon haji.

Menurut Kepala Seksi Operasional Bimbingan Jemaah, Direktorat Pembinaan Haji, Syahlan Arief, program ini awalnya dilatarbelakangi oleh banyaknya pembimbing haji di daerah yang memasuki masa pensiun atau karena mutasi, lantas tidak menjadi pembimbing lagi. Kalau pun sebagai pembimbing, hanya sebagai sambilan.

Dengan alasan itu, kata Syahlan Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina Haji), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) membuat program sertifikasi pembimbing haji. Tujuannya, agar seorang pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang berminat sebagai pembimbing haji benar-benar menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan, sehingga dia benar-benar profesional sebagai pembimbing haji, bukan karena sebagai pejabat struktural dalam pembimbingan jemaah haji.

Dengan demikian, pembimbing itu ke depan diusulkan menjadi pejabat fungsional dalam bidang pembimbingan terhadap jemaah calon haji. Untuk menuju ke sana perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat sebagai pembimbing yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia tidak hanya harus memiliki kemampuan keilmuan secara teoritis, tetapi dia juga punya kemampuan secara praktikal, selalu mengikuti perkembangan terkini hingga punya ide-ide yang bisa menjadikan pembimbingan terhadap para jemaah haji menjadi lebih baik.

Syahlan mengakui, Ditjen PHU memang sudah menyediakan buku panduan bagi pembimbing jemaah haji. Tetapi, di lapangan tentu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Dan, itu menjadi tantangan bagi seorang pembimbing untuk mengatasi suatu keadaan bersama-sama dengan para jemaah calon haji yang dibimbingnya.

"Jadi, seorang pembimbing itu harus berani melakukan improvisasi dan inovasi dalam menghadapi suatu keadaan,

yang mungkin tidak ada dalam buku panduan itu. Pembimbing seperti itulah yang kita harapkan bisa mendapatkan sertifikasi ini," ujar Syahlan kepada Realita Haji di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Program ini merupakan kegiatan baru yang semula akan dilangsungkan pada tahun anggaran 2010, tetapi diakui oleh Syahlan, karena keterbatasan dana, maka baru bisa dilaksanakan pada anggaran 2011 ini, yang dilaksanakan pada 23 dan 24 Maret 2011 yang lalu. Pesertanya pun baru terbatas untuk tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat serta Banten. Masing-masing provinsi mengirimkan 30 orang peserta, sehingga keseluruhan peserta sertifikasi angkatan pertama ini sebanyak 90 orang.

Untuk melaksanakan program ini, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada ke tiga Kanwil Kemenag provinsi tersebut. Mereka harus menyeleksi terlebih dahulu para peserta test sertifikasi secara administratip. Karena peserta test sertifikasi ini terbatas kepada para pegawai atau pejabat di lingkungan Kemenag.

Peserta seleksi itu, menurut Syahlan, pihaknya memberikan kebebasan kepada pihak Kanwil Kemenag, mau berapa orang yang akan diseleksinya. Tetapi, yang bisa mereka kirim sebagai peserta test sertifikasi pembimbing jemaah calon haji hanya 30 orang untuk masing-masing provinsi.

Mengenai target yang ingin dicapai dalam test sertifikasi ini, menurut Syahlan tergantung kepada hasil nilai yang dicapai oleh para peserta. Dengan demikian, kelulusan atas test tersebut benar-benar bergantung kepada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta.

"Jadi, dalam test sertifikasi ini, yang kita harapkan bukan banyaknya yang lulus, tetapi tergantung kepada nilai hasil test, baik test tulis atau pun test praktek. Karena dalam test itu juga akan dinilai kepribadian masing-masing peserta. Sehingga seorang pembimbing bukan hanya punya kompetensi dalam bidang pembimbingan haji, melainkan juga punya wibawa atas jemaah yang dibimbingnya," tegas lelaki asal Lampung ini.

Oleh karena itu, untuk ke depan, seseorang yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing, akan bisa diangkat sebagai pegawai negeri di lingkungan Kemenag menjadi pejabat fungsional. Selama ini, pejabat fungsional yang ada, baru pejabat penyuluhan.

Hanya saja, test sertifikasi ini, menurut Syahlan, untuk tahun pertama dan kedua, terbatas untuk pegawai atau pejabat di lingkungan Kemenag. Baru pada tahun ke tiga akan dibuka untuk umum atau peserta dari luar Kemenag.

"Kalau tidak begitu, nanti yang mendapat sertifikat pembimbing haji itu sebagian besar orang luar. Bisa-bisa orang dalam Kemenag sendiri tidak dapat sertifikat sebagai pembimbing haji, karena kalah bersaing dengan orang luar. Jadi, untuk sementara kita kasih kesempatan kepada orang atau pegawai yang ber NIP Kemenag," ujar pejabat senior di lingkungan Subdit Bimjah itu.

Dengan memberi kesempatan kepada 30 orang masing-masing Kanwil Kemenag, maka untuk seluruh Indonesia peserta seetipikasi di lingkungan Kemenag akan mencapai 990 orang. Diharapkan sertifikasi tersebut akan bisa diselesaikan dalam tahun ke dua atau ke tiga. Selanjutnya akan dibuka untuk umum.

Selama ini, pembimbing haji merupakan pejabat struktural di lingkungan Kemenag. Tetapi ada juga pembimbing dari kalangan pondok pesantren serta pihak-pihak penyelenggara KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dan Ormas yang tersebar di seluruh Tanah Air. Untuk ke depan, para pembimbing itu, juga akan dikasih kesempatan mengikuti sertifikasi ini.

"Kita berharap, semua pembimbing haji adalah mereka yang punya sertifikat pembimbing haji. Sehingga, bagi mereka yang telah memiliki sertifikat, bisa saja jadi pembimbing haji, meski jabatan strukturalnya bukan sebagai pembimbing haji. Orang swastapun juga bisa jadi pembimbing kalau memiliki sertifikat pembimbing haji," ujar Syahlan lagi.

Selama ini fungsi pembimbingan di Kloter masih dirangkap oleh ketua regu (Karu) yang memimpin 10 orang jemaah atau pun ketua rombongan (Karom) yang memimpin 4 regu atau 45 orang jemaah.

Untuk ke depan, menurut Syahlan, pihaknya akan menjadikan pembimbing jemaah itu ada di masing-masing rombongan, walaupun di masing-masing kloter (kelompok terbang) ada TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia)

Hanya saja, menurut Syahlan, sertifikasi pembimbing haji dalam program ini, adalah pembimbing manasik haji di KUA-KUA (Kantor Urusan Agama) untuk jemaah calon haji. "Tetapi ketika pelaksanaan ibadah haji, hanya mereka yang punya seetipikat pembimbing haji yang bisa menjadi pembimbing haji di kloter atau pun di rombongan," tegasnya.

Sedangkan tenaga pengujinya, menurut Syahlan, bukan hanya dari lingkungan Ditjen PHU atau Kementerian Agama, melainkan juga dari luar. Seperti dari Pusdiklat Kemenag, Institut Pertanian Bogor serta dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan konsultan seetipikasi ISO 9001 : 2008.

"Jadi, yang menentukan kelulusan para pembimbing haji itu bukan dari hanya dari kami di lingkungan Ditjen PHU atau pun Kemenag, tetapi juga dari luar yang memang punya kompetensi dalam bidang test dan penilaian dan punya hak untuk memberikan setifikat dalam bidang kemampuan sebagai pembimbing," tegas Kasubdit Bimjah, Asnawi Muhammadiyah, menimpali.

Seperti Prof Entang dari IPB Bogor, merupakan seorang pakar rancang bangun dalam bidang pembimbingan dan pelatihan serta memahami betul pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan Prof. Dr. Juni Pranata merupakan seorang pakar dalam bidang metodologi penilaian dari LAN. Drs. H. Aceng Faturrahman merupakan satu-satunya widyaswara yang memahami betul esensi penyelenggaraan ibadah haji.

Para pakar itulah, menurut Asnawi yang menjadi pembimbing dan konsultan dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing haji, disamping ada konsultan yang khusus mendampinginya dalam pelaksanaan program tersebut, dari perusahaan konsultan yang telah memberikan sertifikat ISO 9001 : 2008 dalam bidang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.■

Bahar Maksum

Mau Apa Setelah Berhaji?

> Haji adalah ibadah yang melelahkan namun nikmat.

Sesuai dengan hirarki ibadah mahdlah islam yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, haji adalah ibadah yang menempati posisi tertinggi. Ibarat ketinggian suatu materi, setiap pendaki dituntut untuk prima bukan hanya untuk menunjukkan kesanggupan mendaki melainkan membuktikan kesanggupan tersebut. Maka pantaslah bila ibadah puasa wajib ramadhan, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan, sementara pergi melaksanakan haji berbekal taqwa. Muncul pertanyaan: Mau apa setelah berhaji? Uraian berikut diharapkan menjawab substansi pertanyaan ini.

Kenangan berhaji

Kita wajib bersyukur karena seluruh jemaah haji yang masih hidup secara berangsur telah berada di negara, daerah asal, dan rumah masing-masing dengan menyimpan dan membawa banyak kenangan. Kecapaian badan hampir teralami oleh seluruh jemaah haji, sebagai yang pernah dilukiskan oleh rasulillah saw bahwa "Haji adalah ibadah yang melelahkan namun nikmat".

Sekadar mengendapkan kenangan-kenangan prosesi ibadah haji itu, maka ada baiknya diurai kembali urutannya mulai dari, bagaimana suka duka tatkala mulai mencanangkan niat untuk beribadah haji; betapa pentingnya mengikuti manasik haji; bagaimana senangnya memperoleh persaudaraan yang lebih luas ketika mulai dilebur ke dalam kelompok terbang, kelompok, dan regu.

Betapa bercampurnya rasa syukur dan sedih ketika dilepas oleh keluarga dan handai tolan pada saat mau meninggalkan kampung halaman; betapa bahagianya ketika memasuki embarkasi haji; demikian nikmatnya ketika mulai masuk ke area penerbangan internasional hingga masuk ke dalam "perut" pesawat, di mana pada umumnya calon jemaah haji kita baru kali itu merasakan enak dan nyamannya naik pesawat hingga tiba di Arab Saudi.

Kita masih ingat betapa bersyukurnya ketika mulai menginjakkan kaki dan menghirup udara serta merasakan iklim Arab Saudi; betapa mulai asingnya kita dengan bahasa dan budaya orang Arab; betapa bugarnya kita sepanjang perjalanan yang sebentar-sebentar makan-minum lagi. Lagi pula, betapa sakral dan sucinya diri kita manakala mengenakan pakaian ihram; betapa kagumnya dan terheran-heran kita melihat wilayah Arab Saudi yang tandus, gersang, namun kehidupan rakyatnya sejahtera, makmur.

Kita bersyukur dan terharu ketika sampai di tanah haram Makkah Al-Mukarramah; betapa kagum dan bangganya kita ketika mulai melihat kawasan Masjid al-Haram; betapa sulitnya kita membahasakan segala puncak perasaan-pikiran kita ketika mulai melihat langsung Baitullah yang sebelumnya hanya kita sering sebut ketika hendak melaksanakan shalat. Ah, betapa nikmat, indah, dan bersyukurnya kita manakala memulai tawaf hingga mengakhirinya. Betapa beratnya lidah dan hilangnya semua hafalan doa manakala kita berada di Multazam untuk berdoa ke hadirat Allah karena larut dalam deraian air mata dan memuncaknya emosi rohani kita sebagai bagian dari syukur atas semua nikmat Allah selama ini.

Sungguh tidak terbayangkannya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim a.s. dan keluarganya mencanangkan tauhid secara monumental kepada umat manusia saat kita shalat dua rakaat di depan maqam Nabi Ibrahim a.s. Betapa nikmat dan hilangnya semua dahaga kita usai meminum air zam-zam. Masih terbayang indah dan bahagianya tatkala menapaki bukit Shafa dan Marwah serta perjalanan sebanyak tujuh kali dalam proses usai mengenang peristiwa bersejarah bagaimana perjuangan keluarga Nabi Ibrahim a.s. Kita gembira dan bersyukur manakala menyudahi proses rangkaian ibadah dengan mencukur rambut atau bertahallul.

Allah Maha Pengasih yang mengajarkan kesucian diri dan kehidupan ini dengan pakaian ihram sebagai bentuk persiapan di hari tarwiyah untuk keesokan harinya berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti rukun haji, wukuf. Betapa tidak adanya milik dan daya kita ketika berada di lapangan miniatur akhirat yakni Padang Arafah. Betapa penuhnya semua relung hati, pikiran, dan perasaan kita manakala mendengarkan dan menyaksikan langsung jutaan mulut hamba-hamba Allah hanya membesarkan, mengagungkan, dan memuji Allah lewat takbir, tahmid, dan tasbih.

Mereka merasakan bagaimana tantangan



dan godaan saat memasuki wilayah Muzdalifah saat mabit, salat sunnat, berzikir, berdoa, dan mengambil batu-batu kerikil untuk dilemparkan di Jamarat (Ula, Wustha, Aqabah). Betapa agungnya kebesaran Allah kita rasakan dan lihat lautan manusia disertai dominannya warna putih, baik pakaian ihram maupun hamparan tenda yang berwarna dan berbentuk yang serupa dan berwarna putih yang ditempati oleh seluruh jemaah haji saat kita mabit di Mina dan melontar di jamarat, kemudian bertahallul. Maka lega dan bahagianya kita bila selamat dari himpitan manusia yang menyesaki jamarat, demikian pula saat melakukan tawaf ifadhah di Baitulllah, Makkah Al-Mukarramah.

Selanjutnya, akan kita sudahi perjalanan atau "wisata rohani" kita di Kota Madinah Al-Munawwarah yang sebelum nabi Muhammad saw hijrah ke sana, bernama Yatsrib, untuk bermusyahadah di depan makam Rasulullah Muhammad saw dengan menyampaikan salam serta bershalawat kepada beliau, termasuk kepada dua sahabat beliau, Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. dan Umar bin Khattab r.a. serta para syuhada lainnya di makam Al-Baqi dan Jabal Uhud.

Memang berat, namun demikian pentingnya arti shalat fardu secara berjemaah tepat waktu di Masjid Nabi saw; serta betapa pentingnya kita menperluas pengetahuan dan wawasan kita mengenai peta awal berkembangnya Islam pada masa Rasulullah Muhammad saw dahulu kala. Hingga pada akhirnya, bagi jemaah yang masih hidup kembali ke tanah air Indonesia tercinta sujud syukur di tempat masing-masing sebagai tanda gembira kembali bisa kembali dengan keluarga, dan bergaul kembali dengan masyarakat sekitarnya serta beraktifitas menjalankan kembali profesinya seperti sediakala.

Semua alur urutan prosesi ibadah haji di atas, kalau kita cermati dan hayati secara mendalam maka kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah berhaji. Semua rukun Islam dan iman yang kita jalankan dan yakini sebelum berhaji, semuanya menjadi bekal dan modal utama kita berhaji. Maka, mereka yang meninggal sebelum berhaji, menurut Rasulullah Muhammad saw. suatu ketika, tinggal memiliki kematiannya apakah mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani?

Maka, segerakanlah beribadah haji sebelum mendahulukan keperluan lain dalam menjalani kehidupan ini. Jemaah haji mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan semua training kehidupan yang sesungguhnya melalui pengalaman berhaji. Maka tolok ukur mabrurnya ibadah haji adalah sepulang dari tanah suci.

Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A.
**Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*

> "
> **Semua rukun Islam dan iman yang kita jalankan dan yakini sebelum berhaji, semuanya menjadi bekal dan modal utama kita berhaji.**

Peran MCH Sebagai Penjernih Informasi Haji

> "Masalah perhajian mencakup masa sebelum orang berangkat (*before*), selama jemaah di tanah suci (*during*) dan setelah jemaah kembali di tanah air (*after*), wa bil khusus untuk pembinaan agar mampu menjaga kemabruran sepanjang hayat.

Penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag RI adalah sebuah peristiwa rutin tahunan, yang meliputi aspek ritual/ spiritual dan bisnis yang besar. Karena melibatkan banyak orang, sekitar 200.000 jemaah dan minimal sekitar satu juta keluarganya dan jumlah uang yang besar dengan multi stakeholders (pemerintah, swasta dan publik di dalam dan luar negeri), penyelenggaraan ibadah haji merupakan peristiwa besar yang menjadi perhatian publik dan sangat rawan untuk mengundang intervensi kekuatan politik.

Sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak dan uang banyak dan keterlibatkan kekuatan politik pasti menarik dan menjadi lahan garapan media massa. Karena mengurus orang banyak itu tidak mudah, kemungkinan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan haji pastilah ada (bahkan bisa sangat besar). Pameo "bad news is good news" di sini berlaku.

Di era modern yang ditandai globalisasi informasi berkat kemajuan teknologi informasi, hajat hidup orang banyak ditentukan (dikuasai/ dipengaruhi) oleh media massa. Sukses atau gagal sebuah kegiatan sangat ditentukan bukan oleh benar atau salah dan baik atau buruk, tetapi oleh persepsi media massa atas suatu fakta dan informasi, bagaimana media massa mengolah dan menyajikan fakta dan informasi kepada khalayak.

Oleh karena itu, pembentukan Media Center Haji (MCH) oleh Depag (sekarang Kemenag) adalah langkah yang tepat. Namun, seiring tuntutan publik untuk pelayanan yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas (good corporate governance), sesuai dengan hak publik untuk mengetahui, fungsi MCH perlu dioptimalkan menjadi "information clearing house" tentang masalah perhajian yang bekerja sepanjang tahun, melalui:

- penyempurnaan organisasi
- penyempurnaan manajemen/tata kelola
- peningkatkan kapasitas sumber daya manusia
- penggunaan Teknologi Informasi mu takhir
- keterlibatan publik yang lebih besar
- dukungan pembiayaan yang memadai.

"Information Clearing House" adalah sebuah lembaga untuk mendapatkan informasi, menjawab pertanyaan, menampung keluhan dan mencarikan solusi yang beroperasi sepanjang tahun, tidak besifat adhoc hanya musiman atau jangka tertentu saja. Mengapa? Masalah perhajian mencakup masa sebelum orang berangkat (*before*), selama jemaah di tanah suci (*during*) dan setelah jemaah kembali di tanah air (*after*), wa bil khusus untuk pembinaan agar mampu menjaga kemabruran sepanjang hayat.

Organisasi

Begitu pentingnya informasi di era modern dan penyelenggaraan ibadah haji bisa menjadi makanan empuk dan bulan-bulanan media massa karena masukan berbagai kelompok kepentingan tapi ternyata MCH tidak tercantum dalam Struktur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tingkat Pusat tahun 1413H/2010M. Mungkin, pelayanan informasi haji hanya menjadi salah satu bagian dari fungsi Biro Humas Kemenag (?). Di struktur organisasi PPIH Arab Saudi tahun 1431H/2010M, juga tidak segera tampak. Ternyata MCH baru muncul di Struktur Organisasi PPIH Daker Jeddah, Daker Madinah dan Daker Mekah dengan tingkat eselon Seksi Pelayanan Informasi dan MCH. Artinya, MCH hanyalah sub-seksi.

Peningkatan Eselon

Fungsi MCH yang sangat penting dan dapat menentukan "nasib" Menag dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), perlu mendapat penguatan secara kelembagaan dalam struktur organisasi PPIH dan bahkan di Struktur Organisasi Kemenag. Di Kemenag hanya ada satu Biro Humas, sementara ada ditjen di Kementerian lain yang memiliki Biro atau bagian Humas (?). Tidak demikian halnya dengan Ditjen PHU, Kemenag. Hal ini perlu dipikirkan karena penyelenggaraan haji adalah kerja besar (atau terbesar?) Kemenag setiap tahunnya.

Manajemen

Setelah MCH secara struktural mendapatkan



Parni Hadi

tempat yang layak, tentu perlu penyempurnaan manajemen/tata kerja. Sebagai "information clearing house", MCH bukan sekedar berfungsi sebagai "pengendali" agar tidak ada berita buruk yang muncul di media massa atau minimal berita yang seimbang. Fungsi MCH sebagai clearing house (ICHH), bukan hanya sebagai pengendali dan atau penyeimbang. Lebih dari itu, yakni sebagai produsen dan distributor informasi serta pemberi advokasi (penjelasan, kejelasan dan membantu mencari solusi atas suatu kasus/komplain). Untuk itu, manajemen MCH harus disusun sedemikian rupa seperti sebuah media massa plus (advokasi). Selama musim ibadah haji, MCH beroperasi di dua tempat di Jakarta dan di Arab Saudi.

SDM. Kemampuan sumber daya manusia MCH seuai dengan fungsinya sebagai clearing house, jelas perlu ditingkatkan agar dapat memberi pelayanan seperti disebut dalam butir 8. Untuk itu persyaratan untuk bergabung di MCH, frekwensi dan durasi diklatnya perlu ditambah. Selama ini SDM penduk MCH berasal dari internal Kemenag, wartawan-wartawan peliput yang direkrut dan beberapa tenaga ahli (media) dari luar Kemenag sebagai anggota dewan pengarah.

Independensi

Selama ini, SDM pendukung MCH yang dari luar dibiayai oleh Kemenag sebagai petugas PPIH. Bantuan pembiayaan itu memang menolong media dan wartawan yang direkrut, tapi dengan status "dibiayai" oleh Kemenag, citra MCH kurang independen. Perlu dicatat independen di sini bukan berarti harus menghasilkan informasi yang jelek-jelek, tapi yang obyektif, cover both sides dan bahkan multisides, semata-mata demi kemaslahatan publik, khususnya jemaah haji dan keluarga mereka. Selama ini, sekalipun "dibiayai", produk MCH cukup obyektif.

Information Technology

Penggunaan IT yang canggih (tercanggih) untuk menjamin keakuratan dan kecepatan menjadi sebuah keharusan. Beberapa awak MCH yang dari media massa yang bertugas di Arab Saudi sudah dilengkapi dengan peralatan canggih untuk pengiriman informasi (naskah dan gambar/foto). Untuk media elektronik, MCH perlu diperkuat dengan transponder satelit (bisa menyewa).

Citizen Journalism

Publik perlu dilibatkan sebagai kontributor informasi dalam rangka pelaksanaan citizen journalism atau jurnalisme warga dan sekaligus untuk demokratisasi informasi. Publik di sini bisa jemaah haji dan atau keluarganya di tanah air serta masyarakat luas. Ini akan mendukung independensi MCH.

Bukan Adhoc

Karena urusan haji ini sepanjang hayat sang haji dan sepanjang masa, selama Islam ada, maka MCH sebagai "information clearing house" tidak boleh bekerja secara adhoc, yakni hanya selama musim haji, tapi harus sepanjang tahun secara berkelanjutan. Tentu, tingkat intensitas kerja disesuaikan dengan kegiatan, yang berpuncak pada musim ibadah haji.

Anggaran

Tentu saja, optimalisasi fungsi MCH sebagai Information Clearing House perlu dukungan dana yang memadai seperti kata orang Jawa: "Jer basuki mawa beya". (Keselamatan atau kwalitas yang baik itu perlu biaya yang setimpal.

Parni Hadi
Pengamat komunikasi



Manajemen MCH harus disusun sedemikian rupa seperti sebuah media massa plus (advokasi).



Jemaah Haji

Jemaah Haji Lansia Diprioritaskan

Kementerian Agama akan memprioritaskan jemaah haji lanjut usia (lansia) dengan memasukkan ke dalam kuota yang tidak terserap. Kebijakan ini untuk memperpendek jarak masa tunggu yang saat ini cukup panjang.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, perlu ada tindakan dan langkah khusus bagi jemaah yang masuk kategori lansia. Jemaah yang masuk kategori lansia ini jemaah berusia antara 60-80 tahun. "Kementerian juga sudah mempertimbangkan agar yang lansia itu tidak menunggu terlalu lama misalnya ada orang yang usianya 65 tahun harus tunggu lima tahun," katanya seusai memaparkan hasil penyelenggaraan haji 2010 di Komisi VIII DPR awal Maret lalu.

Suryadharma mengungkapkan, salah satu kebijakan yang akan ditempuh melalui pemberian kuota yang tidak terserap kepada jemaah lansia. "Setiap tahun itu ada kuota yang tidak terserap, kuota nanti kita kembalikan ke daerah dengan catatan daerah tersebut memprioritaskan lansia," katanya. Suryadharma mengakui, jumlah jemaah lansia Indonesia yang ingin pergi ke Tanah Suci cukup besar. Karena itu, Kementerian Agama merespons animo masyarakat tersebut dengan mendahulukan mereka memasukkannya dalam kuota tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan jemaah yang akan berangkat.

Salah satunya, mereka telah memiliki kesiapan yang matang dalam segala hal baik fisik maupun pendanaan. Tidak sedikit jemaah yang siap secara anggaran, tapi tidak siap dalam hal fisik. "Ada hal-hal lain yang memberatkan mereka berangkat, jadi yang siap segala-galanya, tidak ada sesuatu hal yang menghambat," katanya. Berdasarkan data yang dimiliki, kata dia, umumnya jemaah yang dirawat di rumah sakit merupakan jemaah berusia antara 60-80 tahun. Mereka umumnya dirawat karena menderita penyakit diabetes, darah tinggi, dan jantung.

Jika kuota yang disediakan tidak terserap oleh jemaah lansia, sisa kuota yang ada selanjutnya akan dilelang. Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diterapkan, namun dihentikan. Banyak di antara jamaah lanjut usia masuk dalam rombongan keluarga.

Untuk itu, perlu ada pengkajian kembali lansia yang diprioritaskan dalam kuota. Suryadharma mengaku, selama ini keberadaan jemaah haji lansia menjadi perhatian khusus Kementerian Agama."Biasanya,kalau bapak, kakek,nenek berangkat si cucu atau anak berangkat juga," ungkapnya.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah melobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji bagi Indonesia. Pihaknya telah mengajukan 17.000 kuota bagi umat jemaah haji Indonesia. Saat ini baru mendapatkan kuota 210.000. Usulan penambahan kuota ini untuk mengurangi calon jemaah haji daftar tunggu yang panjang. Saat ini, jemaah haji harus menunggu 4 sampai 10 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. ■

Wajib Haji

Berhaji Cukup Sekali

Kementerian Agama (Kemenag) akan memperketat calon jemaah haji (CHJ) yang akan berangkat ke Arab Saudi. Pemerintah akan memprioritaskan calon jemaah yang kali pertama menunaikan ibadah haji. Sedangkan CHJ yang sudah pernah berangkat akan diundur. Pengetatan dilakukan untuk menekan jumlah daftar tunggu (*waiting list*) haji yang mencapai 1,2 juta orang.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, kebijakan serupa juga dilakukan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di negara kaya minyak tersebut, pembatasan orang bisa kembali naik haji mencapai 5 tahun. Artinya, yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan haji kecuali telah melalui masa yang ditentukan tersebut. "Yang diprioritaskan adalah mereka yang kali

pertama berangkat haji, baik jemaah haji khusus maupun normal, sama saja," ujar Suryadharma.

Meskipun begitu, Indonesia belum bisa menerapkan kebijakan serupa seperti Arab Saudi. Pemerintah baru sebatas menghimbau warga untuk menunda keberangkatan. Sebab, hingga kini belum ada peraturan khusus mengenai kebijakan tersebut.

"Di sinilah perlu kesadaran dari masyarakat. Yang sudah pernah pergi jangan pergi lagi. Kami hanya menghimbau agar mereka jangan berangkat dulu," tutur mantan menteri koperasi dan UKM tersebut.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA), pada dasarnya tidak diperbolehkan penggunaan kuota bagi mereka yang telah berhaji. Karena itu, pemerintah melalui peraturan tersebut telah berupaya melakukan pembatasan. "Sudah kita batasi, kita utamakan porsi utama," kata dia. ■

Penyelenggaraan Haji

Haji Tetap Dikelola Pemerintah

Pelaksanaan ibadah haji di Inonesia tetap akan dikelola oleh pemerintah dan tidak akan diserahkan kepada pihak swasta. "Harus tetap dikelola oleh pemerintah, bukan pihak swasta," kata anggota Komisi VIII DPR RI asal Madura, MH Said Abdullah, Selasa, 8 Maret lalu.

Said mengemukakan hal ini menanggapi keinginan sebagian kelompok penyelenggaraan ibadah haji di Madura agar pihak swasta diberi kewenangan mengelola ibadah haji. Memang, sambung Said, DPR menginginkan agar pengelolaan ibadah haji tidak lagi oleh Kementerian Agama, melainkan oleh badan khusus. "Arah kami rencananya memang ke sana, tapi bukan oleh pihak swasta," kata Said Abdullah.

Ia mengemukakan, pengelolaan ibadah haji yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama, memang dirasa kurang fokus. Nantinya, sambung Said, Kementerian Agama murni hanya akan mengurus penyelenggaraan ibadah hajinya di lapangan, sedang pengelolaan keuangan oleh badan khusus. "Selama ini kan tumpang tindih, urusan uang pada Kementerian Agama dan pengelolaan ibadah haji juga pada Kementerian Agama," katanya. Pihak swasta, kata Said sudah diberi kesempatan tersendiri untuk mengelola ibadah haji, yang disebut dengan 'ONH plus'. "Saya kira itu saja yang dikelola oleh swasta, bukan lantas mengelola secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji," ucap Said Abdullah.

Sebab, sambung dia, jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan ibadah haji, yang akan disalahkan jelas pemerintah, meskipun yang telantar adalah jemaah dari "ONH plus" yang dikelola oleh pihak swasta. "Itulah salah satu alasan kuat kami mengapa pengelolaan ibadah haji perlu tetap dilakukan oleh pemerintah," kata tokoh PDI-P ini, menjelaskan. ■

Embarkasi Padang

Dimanfaatkan Penerbangan Umrah

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang, Sumatera Barat, telah melakukan penerbangan perdana bagi perjalanan ibadah Umrah, Minggu, 13 Maret lalu. Penerbangan perdana menuju Jeddah, Arab Saudi itu menggunakan pesawat Airbus 330-200 dari PT Metro Batavia (Batavia Air) pada pukul 10.30 WIB.

Pelaksana tugas General Manager, Bandara Internasional Minangkabau Hasturman menjelaskan, penerbangan umrah perdana dengan nomor penerbangan Y6 891 itu membawa sebanyak 296 jemaah. Para jemaah pada acara penerbangan umrah itu dilepas Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah. "Awalnya penerbangan umrah perdana ini dijadwalkan pada 2 Maret 2011 lalu, tetapi karena saat itu visa jemaah belum selesai, maka baru bisa dilakukan hari ini," ungkap Hasturman dalam siaran persnya, Minggu, 13 Maret lalu.

Hasturman mengatakan, penerbangan umrah langsung dari Kota Padang itu disambut gembira oleh masyarakat Padang. Penerbangan dari Padang memudahkan perjalanan umrah yang dilakukan masyarakat sekitar. Maklum sebelumnya, untuk menunaikan ibadah umrah, mereka harus melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Setelah penerbangan perdana ini, penerbangan umrah berikutnya dijadwalkan pada 24 Maret 2011 dan 19 April 2011. Penerbangan umrah itu tetap akan menggunakan jenis pesawat dan maskapai yang sama yaitu pesawat Airbus 330-200 dari Batavia Air.■

Visa Umrah

Semakin Diperketat Izinnya

Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen ikut terlibat dalam pencegahan masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Arab Saudi. Bentuknya, kemenag akan memperketat perizinan bagi pengajuan visa umrah melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Itu dilakukan untuk menutup potensi penyalahgunaan visa umrah untuk menjadi bekerja di Tanah Suci.

"Memang, belakangan ini visa umrah menimbulkan banyak masalah. Ujungnya digunakan untuk bekerja dan selanjutnya mereka menelantarkan diri karena overstay," ujar Menag Suryadharma Ali dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu, 23 Februari lalu.

Menurut dia, WNI di Arab Saudi yang habis masa berlaku visanya, atau

overstay harus ditertibkan terkait citra bangsa. Karena mereka banyak tinggal di kolong jembatan dan tempat tak layak agar bisa dideportasi kembali ke Indonesia. Karena itu, untuk mengendalikan pemberian visa Umrah perlu kerja sama dengan pemangku kepentingan termasuk Ditjen Imigrasi. "Minat pergi umrah belakangan ini cenderung naik. Kisarannya antara 10 hingga 15 persen," katanya.

Kecenderungan yang ada saat ini banyak anak sekolah yang nazar jika lulus ujian mereka akan berumrah. Pengusaha juga banyak yang melakukan hal serupa setelah mendapat sukses. Namun, tren yang cukup naik adalah menikah di Tanah Suci. "Hal ini merupakan fenomena baru, yang dulu tak ada," terangnya.

Penertiban visa ini, diharapkan tak mendapat tentangan dari penyelenggara umrah. Biro perjalanan diharapkan mendukung dengan membuat laporan jumlah jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan ke Tanah Air sesuai data. "Jika ada yang kurang harus dilaporkan," ujarnya.

Secara terpisah, pemerintah kembali memulangkan TKI atau WNI overstay dari Arab Saudi. Sebanyak 350 orang TKI kembali ke Tanah Air dengan pesawat GA-983 melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala Pusat Humas Kemenakertrans Suhartono, mengatakan pemulangan kloter ketiga itu merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memfasilitasi pemulangan TKI.■

Jemaah Umrah

Jemaah Asal Polman Meningkat

Animo masyarakat muslim Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Selatan, mengikuti ibadah umrah terus meningkat. Kondisi itu dianggap sebagai pertanda keberhasilan pembangunan dan kemampuan ekonomi masyarakat melaksanakan perjalanan religius dengan difasilitasi perusahaan travel.

Rabu sore 9 Maret, sedikitnya 110 jemaah umrah PT Abi Tour Cabang Wonomulyo dilepas Bupati Polman, Ali Baal Masdar. Dari jumlah itu, 104 jemaah di antaranya warga Polman. Bupati menyatakan bersyukur makin banyaknya jemaah umrah sebagai alternatif bagi umat Islam melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

Sebelumnya calon haji yang masuk daftar tunggu cukup banyak. Hal itu menunjukkan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

Sesuai catatan yang ada, jumlah jemaah haji Polman 2010 lalu sebanyak 520 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 505 orang. Sedangkan daftar tunggu calon jemaah haji mencapai 3.000 orang.

Terkait kondisi tersebut, bupati menganjurkan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji untuk melaksanakan umrah saja. "Yang sudah menunaikan ibadah haji, sebaiknya umrah saja agar umat Islam yang masuk daftar tunggu bisa lebih cepat memperoleh kesempatan," sarannya.

Perwakilan PT Abi Tour, Hasan Manja mengaku telah memberangkatkan 50-an jemaah. Jumlahnya dua kali lipat dengan pemberangkatan kali ini.

Keberadaan swasta memfasilitasi perjalanan umrah menurut bupati, merupakan salah satu bentuk partisipasi menyikapi terus meningkatnya minat umat Islam melaksanakan ibadah haji. ■

Batavia Air

Terbangkan Jemaah Cicilan

Batavia Air melepas penerbangan perdana Paket Cicilan Umrah dari Jakarta ke Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, akhir Februari lalu dengan menerbangkan 287 orang jemaah. "Ini terobosan baru yang meringankan jemaah. Alhamdulillah minat masyarakat dalam program ini sangat besar, pembukuan kami sudah terisi sampai 2012." Ujar Eddy Haryanto, *Public Relations* Batavia Air.

Batavia Air menyediakan angsuran bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah, untuk meringankan beban biaya tinggi bila dibayar langsung. Program ini bekerjasama dengan Madani Tour and Travel. Paket ditawarkan mulai Rp 12,5 juta, dengan pilihan angsuran 6, 12, 24 dan 36 bulan. Batavia Air mengoperasikan dua pesawat berbadan lebar Airbus A330-200 untuk rute Jakarta – Jeddah, yang dioperasikan setiap hari. ■

Kuota Haji

Pemerintah Usahakan Penambahan

Pemerintah Indonesia akan melobi Arab Saudi untuk meminta kenaikan kuota jemaah haji bagi umat Islam di Tanah Air. Langkah ini sebagai solusi mengurangi ribuan calon jemaah daftar tunggu.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan kunjungan kali ini fokus utamanya persiapan penyelenggaraan haji dan peningkatan kuota jemaah.

"Saya akan ajukan angka yang cukup besar, tapi kita serahkan kepada Pemerintah Arab Saudi, berapa yang akan diberikan, kita harapkan ada peningkatan kuota pada 2011 mendatang," katanya pada awal Maret lalu.

Menurut Suryadharma, idealnya kuota haji Indonesia 238.000 jemaah, sedangkan saat ini hanya 210.000. Karena itu, kurang sekitar 17.000 jemaah jika mengikuti jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 238 juta orang. "Saya akan ajukan angka yang cukup besar, tapi kita serahkan kepada Pemerintah Arab Saudi, berapa yang akan diberikan. Kita harapkan ada peningkatan kuota pada 2011 men-



Menteri Agama saat rapat evaluasi dan perencanaan haji.

datang," jelasnya. Usulan penambahan kuota ini untuk mengurangi jumlah jemaah yang masuk daftar tunggu.

Saat ini antrean jemaah yang akan berangkat cukup panjang. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, tidak sedikit jemaah yang harus menunggu antara empat hingga 10 tahun. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan menyampaikan persoalan mengenai pelaksanaan ibadah haji pada 2010 lalu, terutama menyangkut hambatan-hambatan yang ada di imigrasi dan airport Jeddah, saat jemaah haji tiba di Arab Saudi. "Jadi hambatan imigrasi untuk haji misalnya pintu yang terlalu sedikit sehingga tidak bisa memberikan pelayanan maksimal dalam jumlah banyak, jadi antrean terlalu panjang, akhirnya menyita waktu," terangnya.

Apalagi, jemaah baru saja mengikuti perjalanan selama sembilan jam, dilanjutkan dengan menunggu antrean masuk di kantor imigrasi. Kondisi ini dirasa melelahkan dan bisa mengganggu kesehatan para jemaah. Karena itu,Kementerian Agama berharap,pelayanan keimigrasian dari Kerajaan Arab Saudi bisa lebih dipercepat. Dia menambahkan, pihaknya juga ingin menyampaikan persoalan yang menyangkut umrah. Ia berharap, ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan umrah mengingat dari tahun ke tahun pada awal pembukaan masa pelaksanaan umrah selalu ada hambatan. Berdasarkan data yang dimiliki, saat ini tercatat kurang lebih 5.000 jemaah umrah Indonesia belum dapat visa.

Kondisi ini disebabkan aturan-aturan yang sering berubah dan berganti-ganti terkait pengeluaran visa. Diakuinya, pertemuan ini merupakan rapat untuk menyampaikan keinginan, masalah yang dihadapi jemaah haji Indonesia."Nanti pihak kerajaan dan menteri haji serta instansi terkait lain melakukan pembahasan,mungkin dua bulan yang akan datang baru ada keputusan," jelasnya. Selain membahas persoalan di atas, pihaknya juga akan memberikan penjabaran mengenai unsur-unsur yang memperlambat dari sisi jemaah. Sebab, sering kali jemaah terlambat naik pesawat karena membawa barang-barang yang berlebihan sehingga petugas haji memerlukan waktu untuk membongkar lagi tasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat menambahkan, selain mengurus penambahan kuota, kunjungan ke Arab Saudi juga untuk mempersiapkan pemondokan. Menurut dia,saat ini tim telah diberangkatkan untuk mengurus pemondokan bagi jemaah haji.Tim tersebut diberi waktu selama 45 hari untuk memastikan 80% jemaah haji Indonesia, mendapatkan lokasi pemondokan di Ring I saat berada di Makkah pada penyelenggaraan haji 2011 mendatang. Anggota Komisi VIII DPR M Arwani Thomafi mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif menyukseskan penyelenggaraan haji. ■

Guru Ngaji

40 Guru Mengaji Umrah Gratis

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) di Jambi berjanji memberikan kesempatan para guru mengaji di Batanghari untuk menunaikan ibadah umrah secara gratis.

"Program umrah itu muncul, karena para guru ngaji selalu mengajarkan tentang ibadah haji, namun yang bersangkutan sendiri belum mampu dalam sisi biaya untuk melaksanakan ibadah tersebut," katanya di Jambi, Minggu, akhir Februari lalu.

Karena itu, pemerintah memprogramkan ibadah umrah gratis bagi guru mengaji, termasuk di Kabupaten Batanghari. Pemerintah memberikan kesempatan kepada 40 guru mengaji untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah setiap tahunnya.

"Tahun ini, dua guru ngaji dari Kabupaten Batanghari diberi kesempatan itu," katanya.

Selain itu, program peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus dilaksanakan yaitu program bedah rumah bagi masyarakat miskin. "Setiap tahunnya diprogramkan 5.000 rumah akan dibedah sekaligus memberikan sertifikat bagi pemiliknya. Semuanya diberikan secara cuma-cuma," katanya.

Semua itu sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jambi. Hanya dengan SDM berkualitas yang membuat cita-cita dalam memajukan Jambi akan dapat tercapai.■

Vaksin Meningitis

Ketika Layanan Umrah Dihentikan

Calon jemaah umrah atau haji yang ingin vaksin meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Samarinda, harus pulang dengan kecewa. Sejak Sabtu, akhir Februari lalu, layanan vaksin meningitis di kantor tersebut dihentikan sementara. Tak jelas, kapan bisa ada pelayanan.

Sejumlah calon jemaah umrah pun berharap-harap cemas. Soalnya, ada yang sudah terdaftar di biro perjalanan untuk umrah, Maret ini. Namun, sampai kemarin, mereka tidak dapat divaksin.

Sebuah pemberitahuan menggunakan kertas warna kuning ditempel di pintu masuk kantor tersebut. Tak disebutkan hingga kapan vaksin kembali tersedia. Hanya disebutkan, layanan vaksin dihentikan untuk sementara waktu sejak 26 Februari tadi. Pelayanan akan kembali berjalan setelah pemberitahuan berikutnya.

Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda, M Gustiansyah, menyampaikan, salah satu kendala terbatasnya vaksin adalah adanya ketentuan baru dari pemerintah.

"Vaksin yang lama, dinyatakan tidak halal oleh Majelis Ulama Indonesia," ujarnya. Sementara, satu-satunya vaksin yang dapat izin edar dari BPOM baru merek Menveo dengan harga eceran tertinggi Rp 490 ribu.

Ia menyampaikan, vaksin sudah disediakan negara dan kembali normal, pada awal Maret lalu. "Kendala ini terjadi secara nasional. Sebab vaksin yang disetujui hanya satu macam, sehingga semua KKP harus antre dapat vaksin," katanya.

Selama bulan Februari itu, memang terjadi lonjakan. Tercatat sudah lebih 1.000 pemohon.■

Musthafa Helmy



Iklan Ucapan Terima Kasih di harian *Ukaz* (Arab Saudi) dari Menteri Agama RI Drs. Suryadharma Ali MSi, yang juga selaku Amirul Hajj Indonesia 1431 H kepada Raja Arab Saudi Abdullah serta Putra Mahkota Pangeran Sultan dan jajaran perhajian Arab Saudi, termasuk muassasah dan lain sebagainya.



Jemaah haji Pakistan di Makkah.

Dana Haji

Pakistan Tahan Mantan Meteri

Kazmi, menteri agama Pakistan menjadi tertuduh karena terlibat dalam upaya penipuan terhadap ribuan jemaah haji Pakistan. Kazmi diduga menggelapkan dana jemaah haji Pakistan yang disetorkan ke rekening Kementrian Agama pada musim haji tahun lalu.

Petugas Badan Penyelidik Federal Pakistan (FIA), diberitakan telah menahan Hamid Saeed Kazmi hari Selasa, awal Maret lalu. Hal ini dilakukan setelah seorang hakim menolak permohonan Kazmi agar dibebaskan dengan jaminan.

Kazmi menghadapi tuduhan terlibat dalam upaya penipuan terhadap ribuan orang Pakistan yang membayar ongkos naik haji pada kementrian agama tahun lalu. Kazmi menjabat sebagai menteri pada waktu itu.

Jemaah haji Paksitan termasuk jemaah haji terbesar setelah Indonesia dan Iran. Jutaan warga Muslim dari seluruh dunia melakukan ibadah haji ke Arab Saudi setiap tahun. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, paling tidak sekali dalam hidup mereka.■

Dunia Arab Bergolak

Jemaah Umrah Menurun Drastis

Kerusuhan di seluruh dunia Arab telah mengganggu arus peziarah umrah ke Arab Saudi. Biro-biro haji dan umrah di Arab Saudi menyatakan, sepinya jemaah umrah menyebabkan hilangnya 50 juta riyal (sekitar Rp 12,5 miliar) sejak awal musim pada bulan Februari lalu.

Ahmad Abdul Rahman, pimpinan Al-Baraka International Company for Umrah Services, mengatakan, sebagian besar perusahaan umrah beroperasi di Mesir, Tunisia, Yaman, Irak dan Iran telah menderita kerugian besar karena pemesanan yang mereka buat untuk hotel di Makkah dibatalkan. Karena pembatalan dilakukan oleh mereka, maka tak ada ganti rugi untuk hal itu.

Peristiwa yang terjadi di Mesir dan Tunisia, katanya, menyebabkan terhentinya aliran peziarah dari kedua negara. Hal ini telah mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan umrah di kedua negara. Lambat pengurusan visa umrah juga memberikan kontribusi pada kerugian ini, katanya.

Namun, sumber-sumber lain yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan terlalu dini untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan ini kehilangan atau membuat keuntungan karena musim umrah baru saja dimulai. Mereka mengatakan peziarah dari negara-negara lain, termasuk Indonesia, diperkirakan lebih dari satu juta orang.

"Dengan perhitungan sederhana, jika kita berasumsi bahwa setiap satu jemaah umrah menghabiskan 1.000 riyal, maka ini menunjukkan bahwa kerugian perusahaan umrah dapat mencapai 1 miliar riyal selama musim umrah."

Saud Abdul Aziz Al-Sulaimani, Direktur Jenderal Perusahaan Internasional untuk Internet dan Telekomunikasi - perusahaan yang bertanggung jawab atas pemberian visa elektronik Umrah - mengatakan, ada 500 ribu visa telah diterbitkan sejak awal musim umrah tahun ini. Dia menggambarkan angka ini tak jauh berbeda dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 lalu. ■ **(MH)**



Demo di Libya untuk menggulingkan Qaddafi.

Menata Kemandirian Asrama Haji Sukolilo

Asrama haji Sukolilo Surabaya sudah terhitung mandiri dan bisa membiayai dirinya sehari-hari di luar musim haji.



Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur saat melepas keberangkatan kloter 3 dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Jika suatu saat kemalaman di Surabaya, siapa pun bisa langsung menuju asrama haji Sukolilo yang terletak di daerah tenggara kota Surabaya. Kamar ber-AC yang cukup nyaman dengan harga yang relatif murah dan aman bisa dinikmati penginap.

Kamar dengan pendingin yang sangat akrab untuk keluarga karena bisa dihuni enam orang hanya dikenakan biaya sekitar Rp 300.000. Sementara tanpa AC dikenakan Rp 215.000 untuk enam orang. Murah, bukan? Sementara jika tamu datang berombongan bisa mendapatkan diskon khusus.

"Asrama haji Surabaya memang terbuka untuk siapa saja yang mau menginap," kata Drs. H.M. Asyhuri, MM, Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang juga ketua Badan Pengelola Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur.

Asrama haji Sukolilo sudah cukup terkenal terutama untuk romobongan wisata religious, semacam ziarah Wali Sanga. Mereka yang kemalaman dan ingin istirahat bisa memanfaatkan asrama haji Sukolilo. Apalagi, suasana di asrama ini sangat Islami yang membuat penginapnya merasa aman dan tenteram. Masjid di lingkungan asrama haji akan selalu mengingatkan tamu dengan azan pada setiap salat lima waktu.

Asrama haji Sukolilo didirikan tahun 1977 untuk menampung kebutuhan jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Surabaya. Embarkasi Surabaya semula memberangkatkan jemaah haji asal propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Namun, karena adanya pengembangan embarkasi Solo, Banjarmasin dan Balikpapan, maka kini asrama haji Sukolilo hanya menampung jemaah haji asal Jawa Timur, Bali, dan NTT. Sementara jemaah haji asal NTB langsung menuju bandara tak perlu masuk asrama haji lagi, karena semua sudah dikelola sendiri di Mataram, sebagai embarkasi antara.

Kini, asrama haji yang memiliki luas areal sekitar 6 hektare itu hanya menampung sekitar 40.000 jemaah haji dalam 83 kloter. Memang, asrama haji Sukolilo sudah tak seramai beberapa tahun lalu. Nasibnya sama dengan asrama haji Jakarta yang jemaahnya telah digerogoti embarkasi Palembang, Padang, dan Batam. Embarkasi Jakarta kini hanya menampung jemaah haji asal Jakarta, Banten dan Lampung saja. Sementara jemaah haji Jawa Barat ditampung di asrama haji Bekasi.

Strategis

Tapi, justru semakin sedikit jemaah haji yang memanfaatkan asrama haji ini, membuat pengelola asrama haji lebih kreatif untuk bisa mandiri tanpa harus bergantung dengan jemaah haji yang hanya menguras waktu tiga bulan itu. "Sekarang justru tamu di luar musim haji yang cukup ramai," kata Muhammad Choirul Roziq, Kabag Akomodasi Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Sukolilo Surabaya.

Asrama Haji Sukolilo memiliki 14 asrama yang bisa menampung sekitar 2.800 tamu atau jemaah haji. Beberapa kamar, bahkan sebagian besar sudah mempergunakan pendingin ruangan (AC). Asrama ini memiliki 21 gedung, tujuh buah hall, tiga buah aula besar,



Sebagian jemaah haji baru tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

gudang, masjid dua buah, serta halaman parkir yang luasnya 14.640 meter persegi.

Setiap asrama tak sama daya tampungnya. A1 yang dibangun tahun 1981, misalnya, memiliki daya tampung 149 orang dengan luas keseluruhan 960 meter. Padahal, untuk luas yang sama, asrama A2 yang dibangun tahun 1982 bisa dihuni 175 orang. Asrama B1 (dibangun tahun 1980) dan B2 (tahun 1983) juga memiliki kapasitas penginap 175 orang.

Namun, pada asrama C1 (1984), C2 (1982), D1 (1983), dan D2 (1982) daya tampungnya bertambah menjadi 230 orang untuk masing-masing asrama dengan luas sama, 960 meter persegi. Sedangkan bangunan E1 dan E2 yang dibangun tahun 1986, dengan luas 1.064 meter persegi bisa menampung 270 orang. Asrama F1 (1993) dan F2 (1992) dengan luas 912 meter persegi bisa menampung lebih banyak dari asrama E, yaitu sebanyak 272 orang. Dan untuk asrama G1 dan G2 yang keduanya dibangun tahun 1996 dengan luas 1.254 meter persegi namun daya tampungnya hanya 232 orang. Kamar mandi semua menyatu dengan kamar.

Dengan fasilitas dan kapasitas itu, maka asrama haji Sukolilo menjadi saksi mata sejumlah agenda partai dan organisasi yang memanfaatkan asrama haji ini untuk konferensi, muktamar, rapat kerja, atau rapat besar organisasi atau lembaga tertentu. Januari 2011 lalu, misalnya, asrama haji Sukolilo dimanfaatkan untuk Kongres GP Ansor yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga pernah muktamar di sini, begitu juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah partai atau organisasi lainnya.

Fasilitas yang tak dimiliki hotel besar dimiliki asrama haji Sukolilo ini. Sebab, asrama haji ini biasa melayani tamu jemaah haji dalam jumlah ribuan. Di samping itu, kebutuhan aula untuk jemaah haji memungkinkan pula dimanfaatkan pada hari lain untuk disewakan.

Kehadiran Asrama Haji Sukolilo juga menjadikan daerah itu menjadi daerah yang cepat berkembang. Untuk memenuhi tuntutan pengantar jemaah haji kemudian berdiri juga beberapa hotel di sekitar asrama haji yang kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh organisasi massa atau partai politik pada hari di luar musim haji. Di musim haji atau ketika ada perhelatan di Asrama Haji Sukolilo, jalan menuju daerah ini bisa dibilang macet karena lalu lalang bus-bus besar dari dan menuju bandara.

Asrama Haji Sukolio tak begitu jauh dengan bandara Juanda, yaitu sekitar 25 kilometer. Sementara jarak asrama haji itu dengan pusat kota Surabaya hanya berjarak 10 kilometer. Kini, Asrama Haji Sukolilo sudah bisa dijangkau dengan angkutan kota yang tarifnya terbilang sangat terjangkau.

Mandiri

Menurut Asyhuri, Asrama Haji Sukolilo sudah bisa membiayai dirinya sejak tahun 2000. Tahun 2010 lalu, misalnya, Asrama Haji Sukolilo tercatat bisa membukukan pendapatan setiap bulan rata-rata Rp 575 juta. Sementara pengeluaran keseluruhannya mencapai sekitar Rp 6 miliar. Biaya operasional bulanan saja sudah menelan biaya Rp 200 juta yang separuhnya untuk biaya listrik. Sisanya untuk membayar gaji sekitar 50 karyawan tetap dan 63 orang karyawan lepas. Diakui Asyhuri, tahun lalu Asrama Haji Sukolilo mengalami tekor sampai Rp 1 miliar.

Selama ini kekurangan itu ditutup oleh biaya jemaah haji yang setiap jemaah haji dikenakan Rp 60.000 selama tinggal di Asrama Haji Sukolilo selama sehari semalam. Sehingga, dari 40.000 jemaah haji bisa diperoleh dana segar Rp 2,4 miliar. Namun, tahun 2010 lalu pemerintah hingga kini belum mengucurkan dana itu. "Kami sangat menunggu dana itu," kata Asyhuri yang didampingi Choirul Roziq pada awal bulan Februari 2011 lalu.

"Soalnya yang kami perlukan hanya untuk bayar listriknya itu. Sebab, pada musim haji biaya untuk listrik membengkak tajam," kata Asyhuri di Kantor Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang tidak jauh dari Bandara Internasional Ir. H. Juanda itu.

Untuk meraih pengunjung sebesar itu Asrama Haji Sukolilo memang tak perlu beriklan. Dari mulut ke mulut asrama haji ini sudah dikenal sebagai ajang kongres atau hanya sekedar menginap biasa. ■

Musthafa Helmy







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mengucapkan

Terima Kasih

Atas Bantuan, Dukungan dan Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M

Kepada:

- **Bpk. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia**
- **Bpk. Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia**
- **Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**
- **Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**
- **Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia**
- **Para Menteri Terkait Penyelenggaraan Ibadah haji: Mendagri, Menlu, Menkeu, Menhub, Menkes dan Menkumham**
- **Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia**
- **Seluruh Komponen Pengawasan Fungsional: BPK RI, BPKP, KPK dan Inspektorat Jenderal**
- **Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia**
- **Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat, Embarkasi dan Arab Saudi**
- **Unsur Media Massa Nasional dan Lokal baik Cetak maupun Elektronik**

Semoga Allah SWT Memberikan Balasan dan Menjadi Amal Ibadah Kita Semua

Menteri Agama Republik Indonesia

Suryadharma Ali